



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

**20
25**



Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, 28 Februari 2026

Plt. Kepala,



Fadli S, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

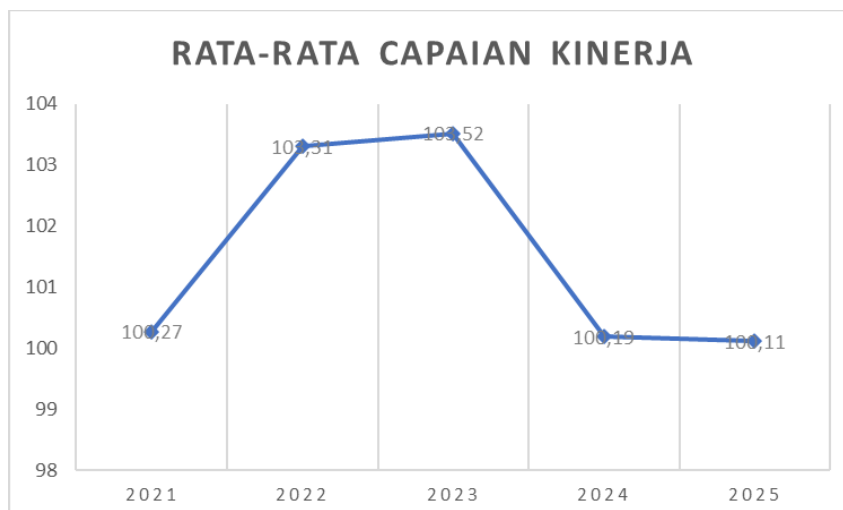
NIP. 197412071994031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dasar pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara. Rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Rata-rata capaian kinerja

Rincian capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS I			
Meningkatnya Kesejahteraan Peternak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	109,12	107,17	98,21
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			98,21
SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Produksi Daging (ton)	77.773,30	83.460,57	107,31
Produksi Telur (ton)	15.799,20	13.671,83	86,53
Produksi Ternak Lainnya (ton)	183,70	189,03	102,90
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			98,92
SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat			
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	78,54	80,65	102,69
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85,50	88,68	103,72
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			103,20
Rata-Rata Capaian Kinerja Keseluruhan			100,11

Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur termasuk predikat kinerja sangat tinggi (capaian $91 \leq 100$) karena capaian keseluruhan indikator mencapai 100,11%. Dari 6 (enam) indikator, semua capaian kinerja dengan predikat kinerja sangat tinggi (capaian $91 \leq 100$) yaitu indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan, Produksi Daging, Produksi Telur, Produksi Aneka Ternak Lainnya, Nilai Akuntabilitas Kinerja, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp133.430.018.800,00,-. Melalui Surat Edaran Gubernur No 900.1/4138/III/BPKAD/2025 tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 8 November 2025 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp131.347.111.882,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp116.294.326.594,00,- dan Belanja Modal Rp15.052.785.288,00,-. Adapun realisasi anggaran Rp 117.299.586.595,00,- (89,30%) dengan rincian untuk belanja operasi Rp 103.559.255.782,00,- (89,04%) belanja modal sebesar Rp13.740.330.813,00,- (91,28%).

Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2025 merupakan lanjutan kegiatan Tahun 2024 dengan perbaikan dan penyempurnaan. Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2025 masih sangat jauh dari yang diharapkan. Namun hasil capaian kinerja ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Kedepan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan dengan pencapaian program/kegiatan yang bermutu dan bermanfaat bagi Kalimantan Timur agar orientasi hasil tidak hanya berdasarkan outcome tetapi juga impact.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Sumber Daya Aparatur	4
E. Aspek Strategis Organisasi	5
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	10
BAB II. PERENCANAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis.....	15
B. Indikator Kinerja Utama	17
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025	23
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	26
C. Analisis Capaian Kinerja	27
D. Realisasi Anggaran	108
BAB. IV PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja.....	iii
Tabel 2. Daftar Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5
Tabel 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	8
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	10
Tabel 5. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	12
Tabel 6. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	13
Tabel 7. Keselarasan Visi dan Misi Gubernur, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026	15
Tabel 8. Program Kegiatan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026	16
Tabel 9. Indikator Kinerja Individu 2024-2026	17
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025	19
Tabel 11. Target Kinerja Populasi dan Produksi APBN	20
Tabel 12. Target Kinerja Kegiatan APBN	21
Tabel 13. Target Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	21
Tabel 14. Anggaran Belanja Langsung APBD per Sasaran Strategis	22
Tabel 15. Perbandingan Nilai SAKIP	23
Tabel 16. Tindak Lanjut SAKIP	24
Tabel 17. Skala Nilai Peringkat Predikat Kinerja	26
Tabel 18. Pengukuran Kinerja Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	26
Tabel 19. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	27
Tabel 20. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	28
Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	29
Tabel 22. Realisasi Tujuan terhadap target Akhir RPJMD/RENSTRA 2025	29
Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional	30
Tabel 24. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	35
Tabel 25. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025	36
Tabel 26. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025	38

Tabel 27. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi	38
Tabel 28. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Nasional	39
Tabel 29. NTP Peternakan Series	40
Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada sasaran 1 (satu).....	43
Tabel 31. Tabel Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja	43
Tabel 32. Program/Kegiatan APBD yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 (satu).....	45
Tabel 33. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua).....	60
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan 2025	61
Tabel 35. Realisasi Sasaran 2 (dua) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	67
Tabel 36. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2 (dua).....	70
Tabel 37. Tabel Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja	71
Tabel 38. Program/Kegiatan APBD yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 (dua).....	72
Tabel 39. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua).....	95
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan 2025	96
Tabel 41. Realisasi Sasaran 3 (tiga) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026.....	96
Tabel 42. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3 (tiga)	96
Tabel 43. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.....	97
Tabel 44. Realisasi Sasaran Strategis RENSTRA 2024-2026	109
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Anggaran	109
Tabel 46. Realisasi anggaran sasaran 3 (tiga) RENSTRA 2024-2026	110
Tabel 47. Realisasi Anggaran Dinas dan UPTD lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	4
Gambar 2.Peta sebaran Kegiatan Inseminasi Buatan (IB).....	81
Gambar 3.Peta sebaran Kandang Ayam Broiler.....	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan (It) dan (Ib) Peternakan Series	37
Grafik 2. <i>Perbandingan NTPP Kalimantan dengan NTPP Nasional Tahun 2025</i>	39
Grafik 3. Produksi Daging Kalimantan Tahun 2024-2025	61
Grafik 4. Produksi Daging (ton) Tahun 2020-2025	62
Grafik 5. Produksi Daging Ternak Ruminansia	63
Grafik 6. Produksi Daging Non Ruminansia (ton) Tahun 2020-2025	64
Grafik 7. Produksi Telur	64
Grafik 8. Produksi Telur Kalimantan Tahun 2024-2025	65
Grafik 9. Produksi Telur Berdasarkan Jenis Ternak Tahun 2020-2025 (ton)	66
Grafik 10. Produksi Aneka Ternak Lainnya (ton) 2022-2025	67

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Kalimantan Timur melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fungsi :

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 tahun 2023 tersebut, mempunyai fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- 2) perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 4) pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbibitan, pakan dan produksi peternakan;
- 6) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kawasan dan agribisnis peternakan;
- 7) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;
- 8) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- 9) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 10) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 11) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 12) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- 1) merumuskan program kerja di lingkungan dinas berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas,

tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- 5) merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan hasil produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- 6) melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi hasil peternakan;
- 7) mengendalikan pelaksanaan program dinas berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

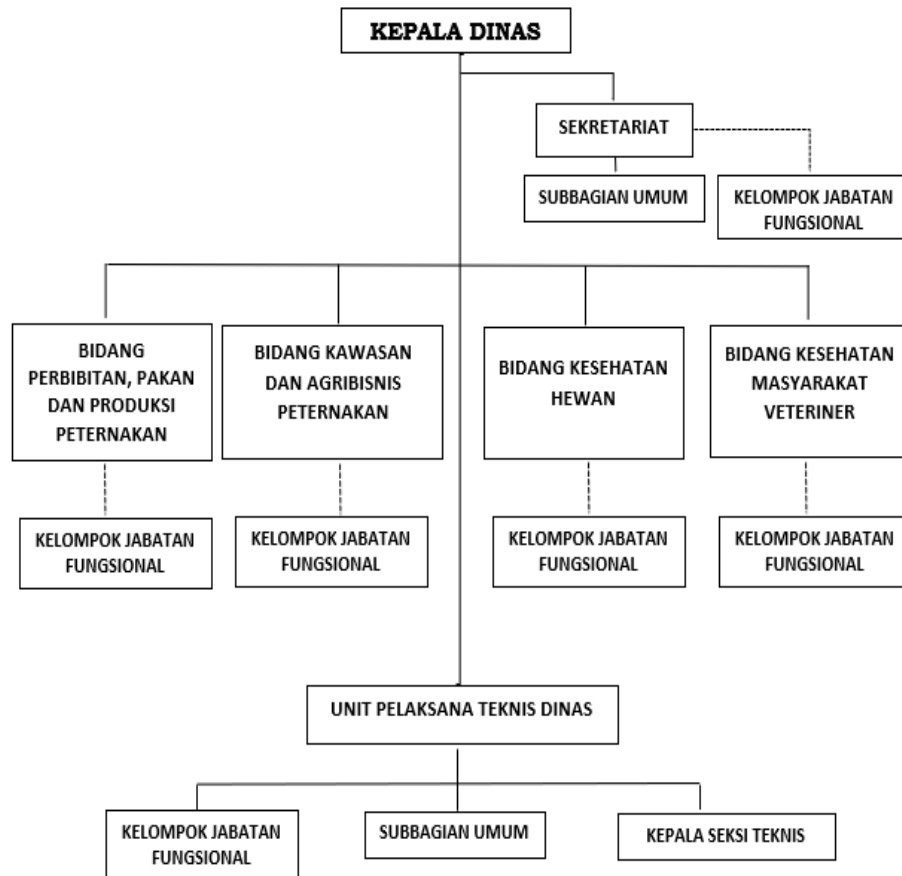
C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh:

1. Sekretariat Dinas
2. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan
3. Bidang Kesehatan Hewan

4. Bidang Kawasan dan Agribisnis
5. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Secara rinci struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

D. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2025 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 169 orang yang terdiri dari 11 orang pejabat struktural, 44 orang pejabat fungsional tertentu, 41 pejabat fungsional umum, serta 73 orang Pelaksana. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

E. Aspek Strategis Organisasi

Tabel 2. Daftar Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan							Pendidikan								
		Laki-laki	Perempuan	IV	III	II	I	X	IX	VII	V	S3	S2	S1	D-IV	D-III	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	Kepala Bidang	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
4	Kepala UPTD	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
5	Kepala Sub Bagian	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
6	Kepala Seksi	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
7	Fungsional Tertentu	25	19	3	13	3	0	11	15	3	0	0	19	23	0	6	0	0	
8	Fungsional Umum	23	18	1	29	11	3	0	37	3	26	0	2	51	1	4	49	0	
10	Jumlah PNS	37	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jumlah PPPK	68	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Jumlah ASN (PNS dan PPPK)	105	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Total Pegawai		169		11	46	14	3	11	52	6	26	1	26	79	1	10	49	0	3

Sebagai bagian dari pembangunan sektor pertanian dan pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan dalam meningkatkan produksinya akan dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang meliputi lingkungan strategis wilayah dan nasional; lingkungan global dan regional; dan lingkungan strategis politik dan ekonomi sebagai berikut :

1. Lingkungan Strategis Global dan Regional

Lingkungan global dan regional mempengaruhi pembangunan peternakan terutama melalui dinamika perdagangan internasional, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi. Globalisasi perdagangan menyebabkan meningkatnya persaingan antara produk peternakan lokal dengan produk impor, baik dari segi harga maupun kualitas. Kondisi ini menuntut peningkatan efisiensi produksi dan daya saing peternakan lokal.

Perubahan iklim global juga berdampak pada ketersediaan pakan, kesehatan ternak, dan produktivitas ternak. Di sisi lain, perkembangan teknologi peternakan modern, seperti sistem kandang close house, teknologi reproduksi, dan digitalisasi peternakan, menjadi peluang dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha peternakan.

2. Lingkungan Strategis Wilayah dan Nasional

Lingkungan strategis wilayah dan nasional memberikan pengaruh signifikan terhadap arah dan capaian pembangunan peternakan. Pada tingkat wilayah, pembangunan peternakan dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, daya dukung pakan lokal, infrastruktur peternakan, kapasitas kelembagaan peternak, serta dukungan pemerintah daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi peluang strategis dalam meningkatkan permintaan produk pangan asal ternak, sehingga mendorong peningkatan produksi dan produktivitas peternakan lokal.

Pada tingkat nasional, kebijakan pemerintah dalam program swasembada pangan, pengendalian inflasi pangan, dan peningkatan ketahanan pangan nasional menjadi faktor pendorong utama pembangunan peternakan. Program nasional seperti peningkatan populasi sapi potong,

pengembangan kawasan peternakan, dan hilirisasi produk peternakan memberikan arah dan dukungan terhadap pengembangan peternakan di daerah.

3. Lingkungan Strategis Politik dan Ekonomi

Lingkungan politik yang kondusif memberikan dukungan terhadap pembangunan peternakan melalui kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran. Komitmen pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan peternakan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan peternakan.

Sementara itu, kondisi ekonomi, seperti tingkat inflasi, daya beli masyarakat, harga pakan, dan harga produk peternakan, sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha peternakan. Kenaikan harga pakan dan biaya produksi menjadi tantangan bagi peternak, sedangkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap protein hewani menjadi peluang dalam meningkatkan produksi dan pendapatan peternak.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH		
Peran sub sektor peternakan dan keswan kurang optimal dalam diversifikasi ekonomi	Produksi belum mencukupi terhadap peningkatan konsumsi pangan asal hewan/ternak	Laju produksi lokal kurang optimal memenuhi kebutuhan pangan asal ternak	Produktivitas komoditas ternak besar rendah, Kualitas genetik ternak rendah		
			Kapasitas peternak dalam pemeliharaan ternak rendah		
			Kurangnya Ketersediaan/kecukupan ternak dasar (betina)		
			belum efisiennya pengelolaan Budidaya (HPP tinggi)		
		Munculnya penyakit hewan menular dan wabah yang mengancam produktivitas ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	Kurangunya program vaksinasi dan pencegahan penyakit hewan yang efektif.	Lemahnya sistem surveilans dan deteksi dini penyakit hewan.	Kurangunya kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan biosekuriti.
					Perdagangan dan Mobilitas Hewan yang sulit dikendalikan
					Sistem Monitoring dan Deteksi Dini yang Lemah dan belum terintegrasi
					Peningkatan populasi Hewan Pembawa penyakit zoonosis
					Masih banyaknya pematangan sapi betina
					Banyaknya tempat pematangan hewan yang berdampak pada mutu keamanan produk peternakan
					Banyak kasus pelanggaran kesejahteraan hewan
Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor peternakan, termasuk kurangnya tenaga ahli dan keterampilan peternak	Kurangunya program pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi peternak dan tenaga teknis.	Minimnya regenerasi peternak dan kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor peternakan.	Kurangunya inovasi dan keberlanjutan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah dan lembaga terkait.		
			Kurangunya Kesadaran tentang Pentingnya Peningkatan Keterampilan		
			Tingkat adopsi teknologi dan inovasi peternakan yang rendah		
Tingginya harga pakan dan keterbatasan ketersediaan bahan baku pakan.	Ketergantungan pada bahan baku pakan impor (dari luar daerah) yang mahal.	Kurangunya pemanfaatan sumber pakan lokal yang potensial.	Infrastruktur dan teknologi pengolahan, produksi, distribusi, penyimpanan bahan baku pakan yang belum memadai		
			Kurangunya Teknologi dan Inovasi dan Minimnya pengembangan varietas unggul tahan kondisi cuaca/iklim dan tanah di Kaltim		

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	Rendahnya pendapatan usaha peternakan untuk menopang kebutuhan ekonomi peternak	Kesulitan peternak dalam mengakses modal dan sistem agribisnis yang tidak kondusif (pasar tidak stabil, ketergantungan terhadap pasar lokal, pergeseran minat ke frozen)	Kurangnya akses ke lembaga keuangan dan program pembiayaan yang terjangkau.
			Tingginya suku bunga pinjaman dari bank konvensional.
			Kurangnya Pengetahuan tentang Manajemen Keuangan dan perencanaan bisnis
			Resiko usaha yang tinggi di sektor peternakan, ketidakjelasan harga pasar
		Keterbatasan lahan untuk peternakan dan infrastruktur yang kurang memadai.	Alih fungsi lahan peternakan untuk permukiman atau kegiatan lain.
			Kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, kandang, dan fasilitas pemasaran.
			Belum optimalnya pemanfaatan lahan bekas tambang, lahan integrasi (perkebunan/perhutanan/lainnya) atau lahan kritis untuk peternakan.
			Belum adanya kawasan khusus peternakan yang didukung oleh regulasi yang jelas.
		Daya saing produk peternakan yang rendah dan kesulitan akses pasar	Kurangnya diversifikasi produk dan hilirisasi produk peternakan.
			Lemahnya jejaring pemasaran dan akses pasar yang terbatas.
			Kurangnya promosi dan branding produk peternakan lokal
			Minimnya komoditas unggulan peternakan
Kurangnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Kurangnya sinergi antara stakeholder dalam pengembangan sektor peternakan.		
	Minimnya peran swasta dan investor dalam mendukung pembangunan peternakan.		
	Kurangnya kelembagaan peternak yang kuat dan berjejaring.		
	Kurangnya insentif bagi peternak dan investor di sektor peternakan.		
Penerapan akuntabilitas dan pelayanan pemerintah belum dilaksanakan secara komprehensif	Belum optimalnya fungsi sistem kesekretariatan	Kurangnya Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah	
		Kurangnya Sistem perencanaan kinerja serta Monitoring-Evaluasi yang Efektif	
		Belum optimalnya pengelolaan BMD dalam mendukung pelayanan umum	
		Kurang tertibnya dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan	
		Kurangnya Teknologi Informasi dan Digitalisasi Pelayanan umum	

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Karpet Masjid/Sajadah	48	meter
2	Karpet Masjid/Musholla	3	meter
3	Kipas Angin	2	Unit
4	SSD External	5	Unit
5	Video Wall	9	Unit
6	Stabilizer	1	Unit
7	Kursi Pejabat	1	Unit
8	Sound System Musholla (Speaker Passive Zetapro+Bracket)	2	Unit
9	Sound System Musholla (Amplifier TOA ZA-2120)	1	Unit
10	Sound System Musholla (Speaker Horn TOA ZH-5050M)	1	Unit
11	Sound System Musholla (HeadSet Kabel TOA ZM-371)	1	Set
12	Sound System Musholla (Microphone Gooseneck Hardwell)	1	Unit
13	Lemari Steril (Sterilisator Kering GET-80C+UPS)	1	Unit
14	Alat Kedokteran (Licare CC-3200 VET 3-Part Auto Hematology Analyzer + 3 Set Reagent Package)	1	Set
15	Alat Kedokteran (Uninterruptible Power Supply (UPS))	1	Unit
16	Rehabilitasi Pagar	1	LS
17	Rehabilitasi Drainase	1	LS
18	Rehabilitasi Tempat Parkir	1	Paket
19	Laptop	7	Unit
20	Tablet PC	1	Unit
21	Televisi	2	Unit
22	Printer dan Scanner	12	Unit
23	Speaker	2	Unit
24	PC/Komputer	4	Unit
25	Kursi Rapat	20	Unit
26	Audio Mixer	1	Unit
27	Brankas	2	Unit
28	Wireless Conference Microphone	8	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
29	Pulse Oxymeter	2	Unit
30	Capnograph Mark II	1	Unit
31	Scanner	5	Unit
32	Rehabilitasi Klinik Hewan	1	LS
33	Pembuatan Gudang	1	LS
34	Alat Perebah Hewan Qurban (Skinning Cradle)	1	Unit
35	Alat Perebah Hewan Qurban (Alat Prosesing Daging)	1	Unit
36	Drone	1	Unit
37	AC	2	Unit
38	Lemari Obat	2	Unit
39	Rehabilitasi Penyimpanan Obat Hewan	1	Paket
40	LCD Proyektor (Wireless Projection, Android 11.0, Bluetooth 5.0)	1	Unit
41	LCD Proyektor (PROJECTOR IN118BBST)	1	Unit
42	Timbangan Hewan Besar	1	Unit
43	Plang Papan Nama	1	Unit
44	Genset	1	Unit
45	Kandang ICU (Pet Oxygen Cage) Klinik Hewan	1	Unit
46	Lemari Arsip	1	Unit
47	Freezer	2	Unit
48	Meja Rapat	1	Unit
50	Kursi Rapat	4	Unit

Tabel 5. Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah	686.4	m ²	
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 309 m ²	
3	Klinik Hewan	0	Ruang	
4	Taman	10	m ²	
5	Listrik	41.500	KVA	
6	Air	1	Jaringan	
7	Telepon	1	Line	
8	Internet	2	Line	
9	Area Parkir	1	Area	
10	Ruang Rapat	1	Ruang	
11	Ruang Pengujian Lab	7	Ruang	
12	Ruang Kepala UPTD	1	Ruang	
13	Ruang Staff	4	Ruang	
14	Ruang Arsip	1	Ruang	
15	Koperasi	0	Buah	
16	Perpustakaan	0	Ruang	
17	Ruang CS	1	Ruang	
18	Komputer PC	6	Unit	
19	Laptop	15	Unit	
20	Ruang Media/ Reagen/Sampel	1	Ruang	
21	Ruang Persediaan/Gudang	2	Ruang	
22	Ruang Pengadaan	0	Ruang	
23	Mobil Dinas	2	Unit	
24	Mobil Dinas Operasional	1	Unit	
25	Motor Dinas	4	Unit	2 unit proses penghapusan
26	Kantin	0	Buah	
27	Website	1	Buah	
28	Papan Pengumuman	1	Buah	
29	LED Display/Running Text	1	Buah	
30	Papan iklan/ Baliho	1	Buah	
31	Mushola	1	Unit	
32	File Arsip	2	Buah	
33	Printer	10	Buah	
34	Scanner	2	Buah	

Tabel 6. Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	504.607	m ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 2.410 m ²
3	Klinik Hewan	1	Ruang
4	Listrik	1	Jaringan
5	Area Parkir	1	Area
6	Ruang Rapat	1	Ruang
7	Koperasi	1	Buah
8	Komputer	10	Unit
9	Laptop	13	Unit
10	Ruang Obat	1	Ruang
11	Ruang Persediaan	1	Ruang
12	Mobil operasional	3	Unit
13	Motor Dinas	9	Unit
14	Kantin	1	Buah
15	Papan Pengumuman	1	Buah
16	Mushola	1	Unit
17	Printer Multifungsi	20	Buah
18	Traktor/Jonder	1	Unit
19	Mesin chopper	4	Unit
20	Mesin penggiling pakan	1	Unit
21	Laboratorium	2	Unit
22	Gedung Mess	1	Unit
23	Gedung Bokashi	1	Unit
24	Gedung display	1	Unit
25	Pos Satpam	2	Unit
26	Gedung Pabrik pakan mini	1	Unit
27	Kandang sapi	8	Unit
28	Kandang Ayam	2	Unit
29	Guest House	1	Unit
30	Gazebo	5	Unit
31	Anjungan Rusa	1	Unit
32	Kandang Gelap	1	Unit
33	Rumah dinas	7	Unit
34	Kandang rusa	1	Unit
35	Gedung pelatihan	1	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	504.607	m ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 2.410 m ²
36	Kandang Infasi	1	Unit
37	Taman	1	Unit
38	excavator	1	Unit
39	Timbangan Sapi	2	Unit
40	Tangki Air	2	Unit
41	Standar Tools/Tool Kit	2	Unit
42	Alat Pembersih/MPR	21	Unit
43	Mixer Pakan Ternak	1	Unit
44	Traktor Tangan	1	Unit
45	Cultivator	3	Unit
46	Genset	1	Unit
47	Jet Cleaner	3	Unit
48	Stamper	1	Unit
49	Jaringan Internet (Starlink)	3	Unit
50	Jaringan CCTV	2	Jaringan
51	IPAL Hatchery	1	Unit
52	Bangunan Hatchery	1	Unit
53	Reservoir Air	2	Unit
54	Pengolah Air Baku/Bersih	1	Unit
55	Paddock Rusa	5	Unit
56	Mesin Penyemprot Kebun HPT	2	Unit

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis atau disebut dengan Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi dan misi Gubernur, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Melalui PK, terwujudlah komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 7. Keselarasan Visi dan Misi Gubernur, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Kinerja Sasaran Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7		
Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan (%)			%	1,94	2,00	2,14	2,29
		Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	108,04	108,58	109,12	110
		Meningkatnya Produksi Pangan Asal Hewan	1. Produksi Daging	Ton	74.461,00	76.024,70	77.773,30	79.717,60
			2. Produksi Telur	Ton	14.834,64	15.294,50	15.799,20	16.352,20
3. Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton		166,62	174,95	183,70	192,88		
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)			Nilai	77,84	78,50	79,30	80,01
	Indeks Kepuasan Masyarakat			Nilai	84,60	85,00	85,50	86,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	75,6	77,07	78,54	80,01
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,25	85,00	85,50	86,00

Tabel 8. Program Kegiatan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Peran Sub Sektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara	Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	Program Penyuluhan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 3 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 4 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 6 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak	1. Produksi Daging 2. Produksi Telur 3. Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton Ton Ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 2 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 3 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 4 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 5 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 6 Penataan Prasarana Pertanian 7 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 9 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
2	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN adalah Program Dukungan Manajemen meliputi kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah. IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Indikator Kinerja Individu 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
A.	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	<p>NTP membandingkan harga jual hasil peternakan dengan harga konsumsi rumah tangga peternak dan harga usaha ternak.</p> <p>Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan = $\frac{\text{Indeks harga yang diterima}}{\text{Indeks harga yang dibayarkan}} \times 100$</p>	Data NTP yang dipublikasikan BPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kawasan dan Agribisnis 2. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Bidang Kesehatan Hewan
B.	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi daging (ton) 2. Produksi telur (ton) 3. Produksi Aneka Ternak Lainnya (ton) 	<p>Ton</p> <p>Ton</p> <p>Ton</p>	<p>1. Produksi Daging = jumlah pemotongan x produktivitas daging per ekor</p> <p>Penjelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi daging sapi = 157,97 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging kerbau = 193,30 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging kambing = 13,50 x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging domba = 15,90 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging babi = 64,21 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging ayam buras = 0,74 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging ayam petelur = 0,90 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) • Produksi daging ayam pedaging = 1,034 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) 	Renstra, Statistik Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan 2. Bidang Kawasan dan Agribisnis 3. Bidang Kesehatan Hewan 4. UPTD LKK 5. UPTD PTHPT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> • Produksi daging itik = 0,83 kg x jumlah pemotongan ternak (ekor) <p>2. Produksi Telur = jumlah betina produktif x produktivitas telur per ekor <u>Penjelasan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Produksi telur ayam buras = 35% x populasi awal x 1,83 kg • Produksi telur ayam petelur = 60% x populasi awal x 12,85 kg • Produksi telur itik = 60% x populasi awal x 9,15 kg <p>3. Produksi Aneka Ternak Lainnya <u>Penjelasan</u> Produksi Ternak Lainnya = \sumProduksi Madu Kelulut + \sumProduksi Sarang Burung Walet + \sumProduksi Daging Rusa + \sumProduksi Ulat Maggot</p>		
C.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 	Nilai Poin	<p>1. Nilai SAKIP <u>Penjelasan</u> Nilai Akuntabilitas Kinerja = \sum Bobot dari sub komponen yang dinilai</p> <p>2. Indeks Kepuasan Masyarakat <u>Penjelasan</u> SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ x Nilai Penimbang</p>	<p>Nilai yang dipublikasi inspektorat</p> <p>Laporan SKM semesteran</p>	1.Sekretariat

C. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTPP) Peternakan	109,12
2	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Hewan	-Produksi Daging (ton) -Produksi Telur (ton) -Produksi Aneka Ternak Lainnya (ton)	77.773,30 15.799,20 183,70
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	-Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai) -Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	78,54 85,50

Pada Tahun 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menyepakati Perjanjian Kinerja Tahunan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada sasaran I (satu) yaitu meningkatnya kesejahteraan peternak dan sasaran II (dua) yaitu meningkatnya produksi pangan asal ternak. Perjanjian Kinerja antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp 148.788.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%),
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran,
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): Rp -

II. Kinerja Tahunan

Tabel 11. Target Kinerja Populasi dan Produksi APBN

No.	Komoditas	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Meat Yield, Ton)	Produksi Telur (Ton)	Produksi Susu (Ton)
1.	Sapi Potong	67.699	7.541,32	-	-
2.	Sapi Perah	70	-	-	76
3.	Kerbau	4.072	112,14	-	-
4.	Kambing	54.648	1.134,04	-	-
5.	Domba	1.027	5,07	-	-
6.	Ayam Pedaging	56.157.278	65.396,19	-	-
7.	Ayam Petelur	1.308.153	-	11.985	-
8.	Ayam Lokal	2.718.545	1.990	2.387	-
9.	Itik	164.274	67,41	1.427,05	-
10.	Babi	36.989	1.527	-	-

Tabel 12. Target Kinerja Kegiatan APBN

No	Uraian	Target	Satuan
1	Layanan BMN	4	Layanan
2	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
3	Layanan Manajemen Keuangan	12	Dokumen

1. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp133.430.018.800,00,-. Melalui Surat Edaran Gubernur No 900.1/4138/III/BPKAD/2025 tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 8 November 2025 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp131.347.111.882,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp116.294.326.594,00,- dan Belanja Modal Rp15.052.785.288,00 Adapun realisasi anggaran Rp 117.299.586.595,00,- (89,30%) dengan rincian untuk belanja operasi Rp 103.559.255.782,00,- (89,04%) belanja modal sebesar Rp13.740.330.813,00,- (91,28%).

Alokasi awal DIPA APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (06) Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur TA 2025 sebesar Rp 148.788.000,- selama tahun 2025.

2. Target Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tabel 13. Target Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	116.294.326.594,00	103.559.255.782,00	89,30
2	Belanja Modal	15.052.785.288,00	13.740.330.813,00	91,28
Jumlah		131.347.111.882,00	117.299.586.595,00,-	89,30

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung APBD Tahun 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Anggaran Belanja Langsung APBD per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Rp 12.696.574.509,00	Rp 11.957.441.584,00	94,18
2	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak	Rp 62.992.353.273,00	Rp 56.246.627.802,00	89,29
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	Rp 55.658.184.100,00	Rp 49.095.517.209,00	88,21
	TOTAL	Rp 131.347.111.882,00	Rp 117.299.586.595,00	89,31

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 penilaian Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **80,65** atau dengan predikat penilaian **A (Memuaskan)** sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot Penilaian Tahun 2023	Bobot Penilaian Tahun 2024	Penilaian		Peningkatan / Penurunan Capaian
				2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	30	30	23,10	23,70	0,60
2	Pengukuran Kinerja	20	30	18,00	24,60	6,60
3	Pelaporan Kinerja	10	15	10,00	12,60	2,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	25	15,40	19,75	4,35
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20		15,20		-15,20
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	81,7	80,65	-1,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A	A	

*Nilai 2 (dua) Tahun terakhir

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Tindak Lanjut SAKIP

REKOMENDASI/ URAIAN RINGKAS	KODE REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / TANGGAPAN URAIAN RINGKAS	KATEGORI			PARAF ITJEN / INSPEKTORAT	KET
			S	D	B		
A Perencanaan Kinerja							
Menyempurnakan dokumen perencanaan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya dengan meningkatkan kualitas revidi terhadap hasil kinerja sebelum menyusun dokumen perencanaan berikutnya		Pada Tahun 2025 dilakukan penyusunan ulang (reviu) RENSTRA 2025-2030 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya					Renstra RANHIR 2025-2030
B Pengukuran Kinerja							
Melakukan sosialisasi berkala kepada seluruh unit kerja tentang pentingnya perencanaan kinerja terhadap pencapaian target		Melakukan rapat sosialisasi SAKIP dan SKP pada Tahun 2024 dan 2025					Notulen/Laporan Rapat sosialisasi
Memfaatkan hasil monitoring dan evaluasi bulanan atau triwulan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahun berikutnya		Telah dilakukan rapat evaluasi triwulan secara rutin					Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan
Mendorong hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja		diterbitkan nota dinas nomor 800/720/DPKH-I tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai, Disiplin Kehadiran Pegawai, Pengembangan Kompetensi dan Pemutakhiran Data SimASN yang menginformasikan "Keterlambatan dalam pengisian SKP akan dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan berjalan sesuai dengan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur"					Nota dinas dan Notulen rapat evaluasi
Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dijadikan dasar utama dalam evaluasi struktur organisasi dan efektivitas program dan kegiatan		1. Melakukan pengembangan SDM 2. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai 3. Penyempurnaan indikator kinerja 4. Efisiensi anggaran					Dokumen Reward dan punishment, BIMTEK, Metadata indikator
Mengintegrasikan hasil pengukuran kinerja ke dalam proses perencanaan dan penganggaran secara sistematis dengan menjadikan capaian indikator kinerja sebagai dasar utama dalam menentukan besaran alokasi anggaran program dan kegiatan		Meningkatkan Kualitas Data Kinerja dengan evidence (data dukung)					
C Pelaporan Kinerja							
Agar laporan kinerja (LKjIP) menyajikan perbandingan capaian kinerja minimal selama 3 (tiga) tahun terakhir		Perbandingan capaian kinerja minimal 3 (tiga) tahun terakhir telah tertuang dalam grafik pada LKjIP 2024 hal. Yang akan diperbaiki dengan format					Laporan LKjIP

REKOMENDASI/ URAIAN RINGKAS	KODE REKOMENDASI	TINDAK LANJUT / TANGGAPAN URAIAN RINGKAS	KATEGORI			PARAF ITJEN / INSPEKTORAT	KET
			S	D	B		
		perbandingan capaian yang dimaksud					
Agar laporan kinerja (LKjIP) disertai dengan analisis atau narasi yang menjelaskan posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap benchmark di tingkat provinsi, nasional maupun internasional		LKjIP 2024 telah berisi analisis singkat capaian kinerja tingkat provinsi dibandingkan dengan capaian nasional. Yang akan dilakukan pendalaman pada analisisnya					Laporan LKjIP
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							
Meningkatkan nilai implementasi SAKIP atas semua komponen penilaian		1. Pelaporan kinerja dengan sistem informasi dan teknologi 2. Koordinasi antar unit kerja sebagai pendorong implementasi SAKIP 3. Penguatan data dan analisis kinerja untuk pengambilan keputusan yang lebih baik					1. Aplikasi SIRANCH, E-SAKIP, E-KINERJA 2. SK Tim SAKIP, Notulen Rapat, Rumusan Rakontekda 3. Rapat Verifikasi dan Validasi DATA

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Skala Nilai Peringkat Predikat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pengukuran Kinerja Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi**	% Capaian
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100)$
1	Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan	%	2,14	6,94	324,30
Capaian Kinerja Tujuan						324,30
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						324,30

Sumber: **data sangat sangat sementara (BPS Kalimantan Timur 2025)

Tabel 19. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100)
1	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	109,12	107,17	98,21
Capaian Kinerja Sasaran 1						98,21
2	Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Produksi daging	Ton	77.773,30	83.460,57	107,31
		2. Produksi telur	Ton	15.799,20	13.671,83	86,53
		3. Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	183,70	189,03	102,90
Capaian Kinerja Sasaran 2						98,92
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78,54	80,65	102,69
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,50	88,68	103,72
Capaian Kinerja Sasaran 3						103,20
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100,11

Sumber : *data sementara (Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim)

Dari sasaran strategis dan tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kinerja yang dicapai menunjukkan telah memenuhi kriteria tinggi dengan rata-rata capaian untuk tujuan sebesar 324,30% dan kriteria sangat tinggi dengan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 100,33%. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis di bawah.

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Analisis atas capaian indikator kinerja pada tujuan

Tujuan 1: Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara

Indikator tujuan yaitu “**Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan**”

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator yang mengukur seberapa cepat perekonomian suatu wilayah atau sektor berkembang dari waktu ke waktu. Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian, sehingga subsektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaannya sebagian masih bergantung kepada impor.

Tabel 20. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi*	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan (%)	%	2,14	6,94	324,30
Capaian Kinerja Tujuan						324,30

*Angka Sementara BPS (2025)

Capaian kinerja terhadap tujuan ini berkriteria tinggi, karena capaian kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap ekonomi daerah terealisasi 6,94% dari target 2,14% dengan persentase capaian 324,30%.

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		%Peningkatan/Penurunan Tahun 2025 6=((5-4)/4)*100
			2023*	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan	%	3,79	6,94	83,11

*data angka sementara BPS Kaltim Tahun 2025

**data angka sangat sementara Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2025 terkait Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan mencapai 6,94% pada Tahun 2025. Mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dengan 3,79%. Secara luas LPE Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu populasi ternak dan produktivitasnya, kebijakan pemerintah dan permintaan pasar dari sektor pertambangan.

Rumus Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$LPE = \frac{PDBt - PDBt-1}{PDBt-1} \times 100\%$$

Dimana:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

PDBt = Produk Domestik Bruto (PDB) sektor peternakan pada tahun tertentu (tahun t)

PDBt-1 = PDB sektor peternakan pada tahun sebelumnya (tahun t-1)

Tabel 22. Realisasi Tujuan terhadap target Akhir RPJMD/RENSTRA 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi**	Tingkat Kemajuan 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan	%	1,96	6,94	354,08

** data angka sangat sementara Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan pada tahun 2024 telah mencapai 6,94% atau 354,08% hingga akhir RENSTRA 2024-2026.

Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional *	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan	%	6,94	6,51	(+)

*Peternakan dalam Angka (2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Subsektor Peternakan nasional sebesar 6,51%. Sedangkan LPE Subsektor Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,94% terhadap LPE nasional.

Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan beberapa faktor penghambat diantaranya:

- Keterbatasan Bibit dan Indukan: Populasi dasar belum mencukupi kebutuhan, terutama kurangnya ketersediaan sapi betina produktif yang menjadi "mesin produksi" ternak.
- Tingginya Angka Kematian Pedet: Manajemen pemeliharaan yang masih tradisional dan pola ekstensif menyebabkan angka kematian anak sapi (pedet) masih cukup tinggi.
- Kualitas Genetik dan Reproduksi: Mutu genetik ternak masih rendah serta pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) sering terkendala oleh pasifnya petugas maupun kurangnya pelaporan kebuntingan dari peternak.
- Penerapan Teknologi: Penggunaan teknologi peternakan tepat guna, seperti sistem kandang tertutup (closed house), belum optimal merata di seluruh level peternak.
- Tingginya Biaya Pakan: Kaltim sangat bergantung pada pasokan pakan dan bahan baku pakan (seperti jagung dan dedak) dari luar daerah, yang menyebabkan biaya produksi membengkak dan mengurangi margin keuntungan.

- Fluktuasi Harga: Harga jual ternak yang tidak stabil dan adanya persaingan dari masuknya produk daging beku dari luar wilayah yang menekan harga ayam hidup lokal.
- Akses Pembiayaan: Minat investasi swasta masih rendah karena peternakan dianggap usaha berisiko tinggi (high risk).
- Rantai Pasok yang Panjang: Panjangnya rantai perdagangan menyebabkan keuntungan lebih banyak dinikmati tengkulak daripada peternak itu sendiri.
- Ketersediaan Lahan: Sulitnya mendapatkan lahan luas dalam satu hamparan untuk kawasan penggembalaan dan belum adanya penetapan kawasan peternakan yang permanen di kabupaten/kota.
- Izin Lahan Eks Tambang: Proses reklamasi lahan pascatambang membutuhkan biaya besar, dan perizinan penggunaan lahan tersebut untuk peternakan masih tergolong sulit.
- Infrastruktur dan Logistik: Biaya logistik tinggi akibat infrastruktur jalan dan transportasi antar daerah di Kaltim yang masih sulit, serta belum adanya pabrik pakan lokal dalam skala industri.
- Wabah Penyakit: Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), dan Avian Influenza (AI) sangat menghambat produksi dan lalu lintas ternak.
- Keterbatasan SDM Teknis: Kurangnya tenaga medis veteriner (dokter hewan), paramedik, dan inseminator di lapangan menyebabkan pembinaan kepada peternak tidak maksimal.
- Regenerasi Peternak: Rendahnya minat generasi milenial untuk terjun ke subsektor peternakan dan kecenderungan masyarakat lebih fokus pada sektor pertambangan atau perkebunan.
- Manajemen Usaha: Sebagian besar peternak masih menganggap ternak sebagai usaha sampingan dengan manajemen yang belum profesional.

Sedangkan Faktor pendorong dalam meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah diantaranya:

- LPE dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan jumlah populasi ternak serta produktivitasnya di lapangan. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas pada budidaya unggas dan aneka ternak seperti lebah kelulut dan burung walet.
- Penerapan Inovasi teknologi seperti sistem kandang tertutup (closed house) pada ayam pedaging/petelur, Penerapan closed house Tahun 2025 berkembang sebesar 31,25% dengan jumlah unit meningkat 45 kandang. Penggunaan teknologi tepat guna lainnya membantu menekan Harga Pokok Produksi (HPP) dan meningkatkan efisiensi
- Keberhasilan menghasilkan bibit berkualitas, dari Inseminasi Buatan dengan meningkatkan bobot lahir dan bobot potong ternak serta produksi daging secara keseluruhan.
- Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN menjadi faktor pendorong krusial karena diprediksi akan terjadi lonjakan permintaan produk peternakan seiring dengan pertumbuhan penduduk. IKN mendorong pengembangan sektor ini guna mencapai kedaulatan pangan lokal.
- Peningkatan konsumsi dan produksi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya protein hewani menciptakan pangsa pasar yang terus tumbuh setiap tahunnya.
- Dukungan dana dari APBD dan APBN, termasuk pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsin), bibit ternak, hingga subsidi jagung untuk pakan ayam petelur, meningkatkan efisiensi biaya produksi.
- Pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di Kaltim untuk integrasi ternak sapi memberikan sumber pakan dan area penggembalaan yang efisien
- Optimalisasi lahan pascatambang yang telah direklamasi sebagai kawasan budidaya peternakan (termasuk model mini ranch) menjadi solusi atas keterbatasan lahan hamparan luas.

- Pembangunan sarana seperti irigasi perpompaan, embung, dan unit pengolahan pakan mendukung ketersediaan air dan pakan yang berkelanjutan.
- Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Sinergi antara pemerintah, akademisi, kelompok ternak, dan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- Pelayanan Kesehatan Hewan: Penguatan fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Hewan), klinik hewan, serta program vaksinasi yang masif untuk mencegah penyakit seperti PMK dan LSD menjaga stabilitas produksi ternak.
- Pemberdayaan Desa Korporasi: Pengembangan model Desa Korporasi Ternak (DKT) bertujuan meningkatkan keterampilan kelembagaan peternak agar dapat mengelola usaha secara profesional dan berbasis teknologi.

Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan yaitu sebagai berikut:

- Optimalisasi Reproduksi: Mempercepat peningkatan populasi melalui program Inseminasi Buatan (IB) yang lebih masif, penanganan gangguan reproduksi, serta penyelamatan sapi betina produktif agar tidak dipotong.
- Penyediaan Bibit Berkualitas: Mendorong produksi semen beku dari pejantan unggul dan menjamin ketersediaan bibit ternak yang bersertifikat (ber-SKLB) untuk meningkatkan bobot potong dan daya saing.
- Intensifikasi Kelahiran: Melakukan pendampingan intensif untuk menurunkan angka kematian pedet (anak sapi) melalui pemberian nutrisi khusus pada induk bunting.
- Pengembangan populasi ayam petelur yang didukung oleh peternak layer
- Pengembangan Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal: Mengeksplorasi dan memanfaatkan bahan baku lokal (seperti jagung daerah, limbah sawit,

dan biomassa perkebunan) untuk menekan ketergantungan pada pakan luar daerah yang mahal.

- Pembangunan Pabrik Pakan Skala Kecil: Mendorong pembangunan unit pengolahan pakan mini (mini feedmill) di sentra-sentra peternakan untuk menurunkan Harga Pokok Produksi (HPP).
- Perluasan Lahan HPT: Meningkatkan luas tanam Hijauan Pakan Ternak (HPT) berkualitas dan pengembangan bank pakan.
- Modernisasi Kandang: Mendorong transformasi peternakan rakyat ke sistem modern seperti kandang tertutup (closed house) pada unggas untuk efisiensi produksi.
- Digitalisasi Manajemen: Mengimplementasikan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) dalam manajemen pemeliharaan, serta optimalisasi aplikasi digital (seperti SIRANCH PDKT) untuk informasi pasar, pelaporan keuangan, dan akses data peternak.
- Pencegahan Penyakit Menular: Memperkuat cakupan vaksinasi rutin untuk penyakit strategis seperti PMK, LSD, Jembrana, dan Avian Influenza.
- Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Meningkatkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), laboratorium veteriner, dan pos pemeriksaan hewan (checkpoint) di wilayah perbatasan untuk mengawasi lalu lintas ternak secara ketat.
- Sertifikasi Produk: Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) guna menjamin produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
- Pembangunan Desa Korporasi Ternak: Mengembangkan model corporate farming untuk meningkatkan skala usaha peternak rakyat agar lebih profesional dan memiliki posisi tawar yang kuat.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Memaksimalkan kemitraan dengan perusahaan tambang (pemanfaatan lahan pascatambang) dan perusahaan sawit (integrasi sapi-sawit) melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

- Regenerasi Peternak: Menyusun program pelatihan teknis dan pendampingan khusus bagi peternak milenial berbasis teknologi.
- Pemantauan Rantai Perdagangan: Mengatur rantai distribusi agar harga di tingkat peternak tidak ditekan oleh tengkulak, serta membuat standar harga jual hasil peternakan.
- Kemudahan Akses Pembiayaan: Memfasilitasi akses peternak ke sumber modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ternak Sejahtera (KTS).
- Optimalisasi Peluang IKN: Memetakan sentra produksi untuk menangkap lonjakan permintaan produk peternakan akibat pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang pasar baru.
- Sinergitas Perencanaan: Memastikan keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen anggaran (APBD/APBN) agar program kerja lebih terukur dan bermanfaat.
- Akurasi Data: Meningkatkan ketekunan dalam pengumpulan data informasi dan sinkronisasi laporan melalui sistem informasi yang terintegrasi (seperti iSIKHNAS) sebagai dasar pengambilan keputusan

Tabel 24. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Tujuan	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Peran Subsektor Peternakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi non Migas dan Batubara	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Peternakan (%)	324,30	89,31	234,99

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada tujuan sebesar (89,31) %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 324,30% tercapai memerlukan serapan anggaran sebesar 89,31%. Tercapainya tujuan ini didukung oleh program APBD dan APBN yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Peternak

Indikator sasaran strategis 1 (satu) adalah

“Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan”

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di suatu wilayah. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Tabel 25. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	
1	Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani (Peternak)	Nilai	TW I	109,12	107,93	98,91
				TW II	109,12	106,55	97,64
				TW III	109,12	106,44	97,54
				TW IV	109,12	107,17	98,21
Capaian Kinerja Sasaran 1						98,21	

Pada tahun 2025 indeks yang diterima petani (It) sebesar 129,24 dan indeks yang dibayarkan petani (Ib) sebesar 120,59 sehingga diperoleh NTP tahun 2024 sebesar 107,17. Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini tinggi, karena capaian kinerja mencapai 98,21% artinya sepanjang tahun 2025 petani ternak masih mengalami keuntungan atau masih bisa belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100

peternak mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

Hal yang dapat mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan adalah indeks yang diterima petani (It) dan indeks yang dibayarkan petani (Ib). Jika *demand* Masyarakat pada produk peternakan meningkat atau tinggi tetapi *supply* dari peternak rendah maka indeks indeks yang diterima petani (It) akan meningkat. NTPP Kalimantan timur juga dipengaruhi oleh harga produksi, harga pakan, biaya logistic tinggi karena infrastruktur jalan/trasnportasi di Kalimantan Timur yang masih sulit antar daerah yang menyebabkan indeks yang dibayar petani (Ib) bisa lebih tinggi dibandingkan indeks yang diterima petani (It). Perbandingan (It) dan (Ib) Peternakan Kalimantan Timur dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1 Perbandingan (It) dan (Ib) Peternakan Series

Tabel 26. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi*		% Peningkatan/Penurunan Tahun 2025
			2024	2025	
1	2	3	5		6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	105,17	107,17	+1,90

*Sumber BPS KALTIM

Pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan NTP Peternakan pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 dari 105,17 menjadi 107,17 atau mengalami peningkatan sebesar +1,90%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk hasil peternakan. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir nilai NTP peternakan paling tinggi pada tahun 2022 mencapai 108,77 dan paling rendah pada tahun 2021 mencapai 104,28. Penurunan nilai NTP peternakan ini akibat dari bergesernya minat konsumsi produk segar ke produk beku, harga jual ayam hidup yang mengalami penurunan dan masih dalam transisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku yang menyebabkan penurunan produksi dan permintaan produk hasil peternakan.

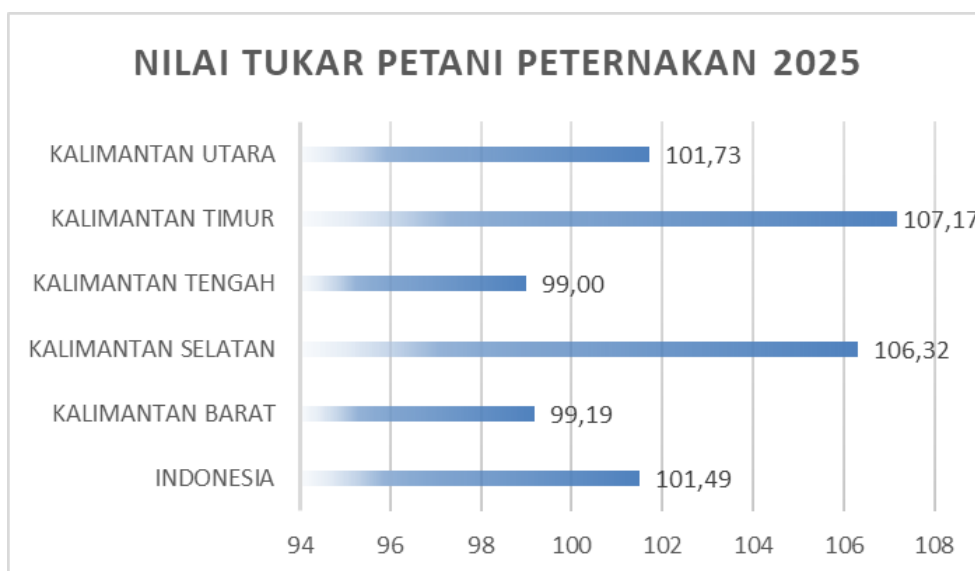
Tabel 27. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Realisasi Renstra	Realisasi*	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	110,55	107,17	96,94

*Sumber BPS KALTIM

Dari tabel di atas, Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan tahun 2025 mencapai 107,17 dengan tingkat kemajuan sebesar 96,94%. Bila dilihat target

akhir Periode Renstra sebesar 110,55 maka NTP Peternakan masih belum mencapai target pada akhir Periode Renstra 2024-2026, dan diharapkan akan dapat meningkat pada tahun setelahnya. Nilai Tukar Petani Peternakan jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan lainnya, posisi NTPP berada pada urutan ke-1 (pertama) yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2. *Perbandingan NTPP Kalimantan dengan NTPP Nasional Tahun 2025*

*Sumber BPS KALTIM

Tabel 28. *Perbandingan Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Nasional*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional *	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	107,17	101,49	(+)

*Sumber BPS KALTIM

Bila dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan tahun 2025 sebesar 107,17 di atas realisasi nasional 2025 sebesar 101,49 yang mengalami peningkatan dari Tahun 2024 yaitu 105,17. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, menggambarkan

kesejahteraan peternak meningkat di Kalimantan Timur dan berada di atas rata-rata kesejahteraan peternak tingkat nasional.

Tabel 29. NTP Peternakan Series

NTP Peternakan	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
PAPUA	1	108,37	2	107,40	11	105,24	11	104,71	13	105,78	14	105,44
NUSA TENGGARA BARAT	2	107,82	1	108,62	7	106,92	10	105,04	4	108,80	4	111,10
PAPUA BARAT	3	104,56	7	105,27	9	106,03	7	106,74	8	107,73	6	109,26
GORONTALO	4	103,37	6	105,68	3	108,50	6	107,29	18	104,10	15	104,06
KALIMANTAN TENGAH	5	103,31	5	105,70	6	107,74	15	103,40	19	103,53	28	99,00
KALIMANTAN UTARA	6	103,21	8	104,75	13	104,55	9	106,08	20	103,46	20	101,73
NUSA TENGGARA TIMUR	7	102,73	10	104,22	4	108,30	1	110,49	6	108,52	12	106,04
SULAWESI TENGGARA	8	102,47	4	105,77	5	108,08	4	107,82	10	106,84	11	106,21
SUMATERA BARAT	9	102,32	17	101,03	10	105,33	2	110,16	8	107,73	16	103,86
SUMATERA SELATAN	10	101,94	13	102,93	12	104,68	19	102,04	27	99,64	19	102,09
KALIMANTAN TIMUR	11	101,65	9	104,28	2	108,77	3	108,62	14	105,17	8	107,17
INDONESIA	98,08		99,19		101,24		101,81		102,48		101,49	

NTP Peternakan (NTPP) Kalimantan Timur, selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuatif dan dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi lain NTP Peternakan selalu berada di 15 (lima belas) besar. Pada tahun 2020 posisi 11 dengan nilai 101,65, Tahun 2021 posisi 9 dengan nilai 104,28, Tahun 2022 posisi 2 dengan nilai 108,77, Tahun 2023 posisi 3 dengan nilai 108,62, Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi posisi 14 dengan nilai 104,14, dan Tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi posisi 8 dengan nilai 107,17. Selama periode 2020 hingga proyeksi 2025, Kalimantan Timur selalu berhasil menjaga nilai NTP Peternakannya di atas rata-rata nasional (Indonesia).

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian target NTP Peternakan Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- Terbatasnya ketersediaan bahan baku pakan di dalam daerah yang mengakibatkan ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar wilayah.
- Akses terhadap pasar serta ketersediaan sarana dan prasarana di daerah yang pada umumnya masih terbatas, sehingga berdampak pada tingginya biaya distribusi.
- Harga pakan yang relatif tinggi, sementara harga jual ternak dan produk hasil peternakan masih rendah.

- Sebagian peternak rakyat masih menjalankan usaha dalam skala kecil sehingga belum mampu mencapai efisiensi biaya produksi.
- Adanya ancaman penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Avian Influenza (AI), Penyakit Jembrana, dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang berpotensi menurunkan produksi dan produktivitas ternak.

Faktor pendorong dalam pencapaian target NTP Peternakan Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- Optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal yang berpotensi sebagai sumber pakan ternak.
- Terbukanya peluang pengembangan berbagai komoditas ternak, seperti sapi, kambing, domba, kerbau kalang, ayam, itik, kelulut, dan walet.
- Pelaksanaan program pengembangan desa korporasi ternak yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kelembagaan peternak guna mendorong peningkatan produksi serta produktivitas.
- Penguatan fungsi dan peran koperasi peternak dalam penyediaan sarana produksi sekaligus mendukung pemasaran hasil ternak.
- Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membuka peluang pasar baru dan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan.
- Inovasi sistem pemasaran hasil ternak melalui pemanfaatan aplikasi digital SIRANCH PDKT.
- Peningkatan kompetensi peternak melalui pelatihan teknis dan kegiatan pendampingan berkelanjutan.
- Upaya regenerasi peternak dalam subsektor peternakan yang berbasis teknologi untuk mendukung keberlanjutan usaha

Untuk mencapai target akhir Renstra Tahun 2024–2026, diperlukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, antara lain:

- Melakukan identifikasi dan pemetaan sentra potensial bahan baku produksi pakan lokal sebagai upaya mendukung kemandirian pakan.
- Memperkuat kelembagaan peternak melalui pengembangan dan pembentukan desa korporasi ternak.

- Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem informasi pasar guna memperluas akses dan transparansi harga bagi peternak.
- Memperkuat fungsi checkpoint, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), serta pelaksanaan vaksinasi rutin untuk mencegah Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ).
- Menyelenggarakan pelatihan bagi peternak serta mendorong penerapan inovasi teknologi peternakan modern guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha

Tabel 30. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada sasaran 1 (satu)

No	Tujuan	Indikator Kinerja	%Rata-rata Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	98,21	94,18	4,03

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sudah cukup baik yaitu sebesar 4,03%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 98,21% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 94,18% atau sebesar Rp11.957.441.584,- dari target Rp12.696.574.509,- Serapan anggaran mencapai 94,18%. Artinya untuk mencapai target sasaran 1 (satu) masih bisa dilakukan efisiensi anggaran. Tercapainya sasaran 1 (satu) ini didukung oleh Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian.

Tabel 31. Tabel Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Capaian Kinerja	102,23	104,89	103,11	96,54	98,21
			% Realisasi Anggaran	81,5	93,2	99,61	87,07	94,18
			Tingkat Efisiensi	20,73	11,69	3,5	9,47	4,03

Pada sasaran pertama Meningkatkan Kesejahteraan Peternak memiliki tingkat efisiensi Tahun 2021 (20,73), Tahun 2022 (11,69) Tahun 2023 (3,50), Tahun 2024 (9,47) dan Tahun 2025 4,03 Nilai (+) tersebut menunjukkan bahwa penggunaan

anggaran efisien terhadap capaian kinerja. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Nilai Tukar Peternak (NTP) pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32. Program/Kegiatan APBD yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 (satu).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Perse n (%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	97,29	100,00	102,79	43.737.435.565,00	40.791.296.198,00	93,26
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	%	47,62	51,38	107,9	1.984.103.068,00	1.643.104.269,00	82,81
	Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	%	27,00	47,37	175,44			
	Jumlah produksi pupuk asal KOHE	Ton	410.000,00	413.936,00	100,96			
	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi	KK	660,00	719,00	108,94			
	Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak	MilyarRupiah	920,00	1.059,66	115,18			
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4,00	4,00	100	1.160.221.766,00	940.110.757,00	81,03
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	3,00	3,00	100	823.881.302,00	702.993.512,00	85,33
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,81	100,00	104,37	10.185.095.964,00	9.751.567.960,00	95,74
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas	Jumlah konsumsi Pangan asal ternak balita potensi stunting	Gram/Hari	30,50	33,33	109,28	2.234.574.591,00	2.124.425.784,00	95,07

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Perse n (%)
Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	%	1,35	1,86	137,78			
	Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	%	86,00	88,89	103,36			
	Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ	Unit	36,00	36,00	100			
	Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif	%	24,00	20,98	112,58			
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	13,00	13,00	100	Rp 537.633.358,00	Rp 509.803.735,00	94,82
Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	2,00	2,00	100	Rp 182.457.416,00	Rp 169.635.080,00	92,97
Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	UnitUsaha	9,00	16,00	177,78	Rp 163.505.512,00	Rp 145.620.895,00	89,06
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	UnitUsaha	10,00	10,00	100	Rp 805.691.488,00	Rp 794.571.072,00	98,62
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	UnitUsaha	30,00	30,00	100	Rp 329.437.124,00	Rp 297.003.220,00	90,15
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan	Orang	400,00	400,00	100	Rp 215.849.693,00	Rp 207.791.782,00	96,27

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Perse n (%)
	masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan							
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	%	60,00	78,05	130,08	Rp 195.817.762,00	Rp 180.216.485,00	92,03
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	60,00	60,00	100	Rp 195.817.762,00	Rp 180.216.485,00	92,03
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	Skor	99,59	100,00	100,41	Rp 142.214.340,00	Rp 129.842.000,00	91,3
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	%	65,80	66,30	100,76	Rp 142.214.340,00	Rp 129.842.000,00	91,3
	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan	UnitUsaha	126,00	126,00	100			
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	790,00	797,98	101,01	Rp 71.920.520,00	Rp 69.957.700,00	97,27
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4,00	4,00	100	Rp 70.293.820,00	Rp 59.884.300,00	85,19

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Perse n (%)
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	Skor	99,73	100,00	100,27	Rp 2.301.747.134,00	Rp 2.194.896.245,00	95,36
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rasio SD komoditas/ produk peternakan	rasio	1,15	1,17	102,09	Rp 376.023.682,00	Rp 335.808.079,00	89,31
	jumlah peternak millennial	Orang	100,00	237,00	237			
	Jumlah pembudidaya unggas	RTUP	49.158,00	49.158,00	100			
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	3,00	3,00	100	Rp 218.544.874,00	Rp 182.507.503,00	83,51
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	15,00	26,00	173,33	Rp 157.478.808,00	Rp 153.300.576,00	97,35
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	Unit	12,00	12,00	100	Rp 1.925.723.452,00	Rp 1.859.088.166,00	96,54
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	21,00	22,00	104,76	Rp 1.552.432.312,00	Rp 1.514.700.560,00	97,57
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	12,00	12,00	100	Rp 373.291.140,00	Rp 344.387.606,00	92,26

I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program ini merupakan program prioritas indikator Provinsi Kalimantan Timur. Capaian program (outcome) ini adalah Tingkat Pemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis. Capaian pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu 102,79%. Tingkat Pemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis mendapat skor 100,00 dari target skor 97,29, capaian keuangan mencapai 93,26% atau sebesar Rp40.791.296.198,- dari Rp43.737.435.565,-.

Kegiatan yang mendukung program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yaitu kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian mempunyai indikator sebagai berikut:

a. Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas

Capaian kinerja indikator Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas adalah 51,38 atau 107,9% dari target 47,62%, pada Tahun 2025 dari 290 unit biogas terdapat 149 unit biogas yang dimanfaatkan dan 141 unit biogas yang belum dimanfaatkan.

b. Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil

Capaian kinerja indikator Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil adalah 47,37% atau 175,44% dari target 27%, terdapat peningkatan 81 unit usaha pengolahan hasil pada Tahun 2025.

c. Jumlah Produksi Pupuk Asal KOHE

Capaian kinerja indikator jumlah produksi pupuk asal KOHE adalah 413.936 ton dari target 410.000 ton atau 100,96%. Perhitungan Pengolahan Kotoran Hewan (KOHE) didapatkan dari populasi Tahun 2025 (Sapi dan Kerbau 14.423 ton/tahun, sapi 5.466 ton/tahun, kambing dan domba 11.149 ton/tahun dan Ayam (Buras, Petelur, Pedaging) sebanyak 382.909 ton/tahun)

d. Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi

Capaian Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi pada Tahun 2025 adalah 719 KK dari target 660 KK atau 108,94%. Fasilitasi yang diberikan berupa Pengembangan budidaya lokal dan fasilitasi kandang ayam 50 KK pada Kabupaten Penajam Paser Utara 3 Kelompok, Kota Bontang 14 Kelompok dan Pengembangan Budidaya Lebah Madu pada Kota Bontang 7 Kelompok.

e. Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak

Capaian kinerja indikator Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak dari target 920 Milyar Rupiah terealisasi 1.059,66 Miliar Rupiah atau 115,18%. Total nilai rupiah setara dengan 158.128 Kg walet dengan harga jual Rp 5500-Rp 7000

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut :

- Data pelaku usaha belum sepenuhnya mutakhir dan tervalidasi, sehingga berpotensi mempengaruhi ketepatan perencanaan dan evaluasi program
- Pemanfaatan kotoran hewan menjadi pupuk masih diproduksi dalam skala kecil dan dimanfaatkan sendiri oleh kelompok
- ketidaksesuaian dan validasi antar sumber data khususnya terkait data pemanfaatan biogas oleh peternak (dimanfaatkan/tidak dimanfaatkan)
- Sebagian keluarga miskin masih bergantung pada bantuan langsung tanpa ada pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan
- data belum lengkap, data yang tersedia hanya sampai dengan bulan Oktober 2025

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebagai berikut :

- Dukungan kebijakan pemerintah, kemudahan perizinan dan akses pembiayaan sebagai modal usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan promosi produk

- Pemanfaatan kotoran hewan oleh peternak didorong oleh ketersediaan bahan baku, dukungan kebijakan pemerintah, akses teknologi, pendampingan teknis, serta kesadaran peternak terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan dari biogas dan pupuk organik
- Pemanfaatan biogas oleh peternak didorong oleh dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan bahan baku ternak, pendampingan teknis, serta kesadaran peternak terhadap pemeliharaan, manfaat ekonomi dan lingkungan
- Pendampingan teknis/pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi bantuan yang telah diberikan
- permintaan pasar yang tinggi, dukungan kebijakan pemerintah, akses pelatihan dan pendampingan teknis, ketersediaan modal, jaringan pemasaran yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, serta kesadaran dan motivasi peternak untuk mengembangkan usaha

Tindak Lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah diatas diantaranya:

- penyesuaian target dan indikator kinerja pada periode perencanaan selanjutnya
- melakukan pendataan terkait produksi pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk
- memberikan edukasi dan pelatihan/bimtek kepada peternak
- pendampingan teknis/pembinaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap peternak/kelompok
- pemutakhiran dan verifikasi data di lapangan, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi secara berkala
- melakukan monitoring dan evaluasi terkait efektivitas bantuan, tingkat pemanfaatan, dan perubahan kesejahteraan keluarga miskin
- koordinasi dengan instansi terkait yaitu Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur

II. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program ini memiliki 1 (satu) capaian program (outcome) yang mendukung NTP adalah Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner. Capaian pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu 104,37%. Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner mendapat skor 100,00 dari target skor 95,81. Capaian keuangan mencapai 95,74 atau sebesar Rp9.751.567.960,- dari pagu Rp10.185.095.964.-.

Kegiatan yang mendukung Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu:

- Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan mempunyai indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting
Capaian kinerja indikator jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting adalah 33,33 gram/hari atau 109,28 gram hari dari target 30,50 gram/hari. Pada tahun 2025 Program pemberian bantuan pangan asal hewan berupa telur ayam ras dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Paser Tahun 2025 menyasar 400 orang yang terdiri dari baduta potensi stunting serta ibu hamil dan ibu menyusui di beberapa kecamatan, dengan metode pemberian 1 butir telur per orang per hari (50 gram) selama 60 hari sehingga total distribusi mencapai 24.000 butir atau setara 144.000 gram protein.
 - b. Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan
Capaian kinerja indikator persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan adalah 1,89% atau 137,78% dari target 1,35%. Pada tahun 2025 Target awal indikator Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan Hewan ditetapkan sebanyak 9 unit usaha peternakan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembinaan dan pengawasan prinsip-prinsip kesrawan pada 31 unit usaha peternakan dengan total unit usaha yang telah menerapkan Kesrawan yaitu 16 unit usaha peternakan.
 - c. Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)
Capaian kinerja indikator Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) adalah 88,89% atau 103,36% dari target 86,00%. Pada tahun 2025 jumlah sampel yang diambil dari sampel identifikasi DNA babi, cemaran mikroba, cemaran kimia berjumlah 1.161

sampel. Adapun hasil dari pengujian tersebut didapatkan sebanyak 1.032 sampel dinyatakan negatif.

d. Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ

Capaian kinerja indikator jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ adalah 36,00 unit atau 100 unit dari target 36,00 unit. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap sampel (darah segar, serum darah) ternak ruminansia besar dengan hasil negatif untuk penyakit Brucellosis, Jembrana dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan untuk ruminansia kecil dengan hasil negatif untuk penyakit Brucellosis dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

e. Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif

Capaian kinerja indikator persentase pemotongan ternak sapi betina produktif adalah 20,98% atau 112,58% dari target 24,00%. Pada tahun 2025 realisasi persentase pemotongan ternak sapi betina produktif hingga Triwulan IV mencapai 20,98%, lebih baik (lebih rendah) dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 24%, dengan total kumulatif pemotongan ruminansia betina sebanyak 400 ekor dari 17.201 ekor pemotongan ruminansia secara keseluruhan dan tercatat tidak terdapat pemotongan betina produktif sepanjang tahun.

● Sertifikat Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai indikator sebagai berikut:

a. Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan

Capaian kinerja indikator Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan adalah 78,05 atau 130,08% dari target 60,00%.

Pada tahun 2025 untuk rekomendasi pemasukan produk hewan ke Provinsi Kalimantan Timur diperoleh total penerbitan yang diproses berjumlah 319 rekomendasi dengan jumlah rekomendasi yang disetujui berjumlah 247 rekomendasi dan total rekomendasi pemasukan yang ditolak berjumlah 72 rekomendasi. Untuk rekomendasi pengeluaran produk hewan dari provinsi Kalimantan Timur berjumlah 9 rekomendasi dengan jumlah rekomendasi yang disetujui berjumlah 9 rekomendasi.

Beberapa faktor penghambat yang ada di program Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- Adanya kasus di kecamatan yang sama sehingga tidak menambah jumlah kecamatan yang terkendali zoonosis.
- Lalu lintas ternak antar wilayah kabupaten/kota serta antar peternak sulit terpantau yang berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit hewan, Kurangnya pemahaman peternak/kelompok ternak terkait pentingnya manajemen kesehatan hewan, Pelaporan kasus PHMSZ terkadang lambat sehingga petugas terlambat dalam penanganan kasus, Sistem pemeliharaan secara konvensional serta ekstensif.
- Keterbatasan SDM baik medik maupun paramedik di lapangan, Keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi sehingga menghambat pelaporan kasus penyakit ke iSIKHNAS, Peternak belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan penyakit hewan secara cepat, terbatasnya ketersediaan Puskesmas di Kabupaten/Kota.
- Pelaporan kasus gangguan reproduksi/diagnose belum dilaporkan secara optimal, penanganan gangguan dan kesembuhan gangguan reproduksi belum dilaporkan secara menyeluruh pada iSIKHNAS; Keterbatasan SDM Medik Reproduksi di Kabupaten/Kota; Penanganan gangguan reproduksi memerlukan waktu yang relatif Panjang, gangguan reproduksi tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata.
- Kurangnya pemahaman peternak/kelompok ternak/koperasi terkait pentingnya manajemen kesehatan hewan, Pelaporan kasus PHMSZ terkadang lambat sehingga petugas terlambat dalam penanganan kasus, Keterbatasan sumber daya manusia medik dan paramedik veteriner, Penerapan biosecurity masih sangat kurang.
- Kasus stunting pada balita masih banyak terjadi dan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur
- Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan ASUH belum optimal karena masih ditemukan produk yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi
- Identifikasi status betina produktif belum optimal karena keterbatasan pemeriksaan reproduksi baik di RPH maupun di luar RPH
- Belum adanya indikator tetap tentang cara penilaian checklist kesrawan, sehingga kesimpulan unit usaha sudah dan belum optimal dalam menerapkan kesrawan berdasarkan kesepakatan tim, Belum adanya pemahaman peternak/kelompok ternak/koperasi tentang kesejahteraan hewan, terutama pentingnya penerapan

biosecurity dan recording terkait kesehatan ternak, Keterbatasan SDM dalam menangani ternaknya (Paling banyak 4 penjaga untuk 1 unit usaha) sehingga kurang monitoring

- Ketidaksesuaian informasi yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, ketidakmampuan sistem pelacakan dan sertifikasi produk, kendala geografis dan infrastruktur, tantangan dalam penegakan peraturan dan pengawasan, isu keamanan pangan dan kesehatan hewan, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk implementasi sistem yang efektif.

Beberapa faktor pendorong yang ada di program Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dini zoonosis
- Tersedianya prasarana pendukung yaitu Pusat Kesehatan Hewan, sarana pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan penyakit hewan, Komitmen dari petugas
- Terdapat unit pelayanan kesehatan hewan yaitu Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) dan Klinik Hewan, Tim Pelayanan Keswan terkait dengan kontrol populasi HPR, Peraturan perundangan, Sarana pendukung pelayanan keswan
- Adanya Tim Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Adanya Medik Reproduksi, Sarana penunjang penanganan gangguan reproduksi
- Kelompok ternak pada lokasi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sudah berbadan hukum, Kelompok ternak sebagian besar sudah terdaftar di Simluhtan, Adanya Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Tersedianya sarana pelayanan keswan dan biosekuriti (obat, alat keswan dan desinfektan)
- Pemberian bantuan pangan asal hewan berupa telur dimana dengan mengkonsumsi telur dapat membantu meningkatkan asupan protein dan mikronutrien penting yang mendukung pertumbuhan optimal.
- Kewajiban NKV sesuai UU 18/2009 jo. UU 41/2014 dan Perlindungan konsumen produk hewan
- Adanya Perda dan Pergub terkait pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepolisian RI terkait pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif
- Upaya untuk menjamin keamanan dan kesehatan produk hewan dari penyakit, memastikan produk sesuai standar, mengontrol pergerakan antar wilayah, serta mendukung antar wilayah, serta mendukung perdagangan yang aman dan sehat melalui pemeriksaan oleh otoritas dan penerbitan sertifikat yang sesuai

Tindak lanjut:

- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pengamatan dini melalui surveilans/pengambilan dan pemeriksaan laboratories, pencegahan PHMSZ melalui vaksinasi hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMSZ
- Peningkatan kapasitas petugas di lapangan, membuat jejaring sehingga mempercepat respon penanganan penyakit melalui pelayanan kesehatan hewan, komunikasi informasi dan edukasi kepada peternak
- Melakukan koordinasi dengan Koordinator iSIKHNAS khususnya di Kabupaten/Kota terkait pelaporan Gangrep melalui iSIKHNAS, Membuat timeline berupa pencatatan kasus gangrep, penanganan sampai tingkat kesembuhan gangrep, Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait kasus dan penanganan gangrep di lapangan

III. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Program Perizinan Usaha Pertanian memiliki capaian outcome Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan dengan skor 100 dari target 99,59 dengan persentase 100,41%. Realisasi keuangan Rp129.842.000,00,- dari pagu Rp142.214.340,00,- dengan persentase 91,3%. Program ini didukung dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator sebagai berikut:

- a. Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice
Realisasi Capaian Jumlah Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice adalah 66,30% dari target 65,80% persentase 100,76%. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan 10 Perusahaan/inti bersama 328 orang/plasma dan 210 peternak,petugas Kab/Kota.
- b. Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan
Realisasi capaian jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan sebanyak 126 unit dengan target 126 unit persentase 100%. Peran swasta pada tahun 2025 mengalami peningkatan 4 unit dari capaian tahun 2024 sebanyak 122 unit. Produk peternakan merupakan jenis bantuan yang paling banyak diberikan, yaitu sebesar 56,35% atau sebanyak 71 kontribusi dari pihak swasta..

Beberapa faktor penghambat yang ada di program Program Perizinan Usaha Pertanian adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama antara perusahaan inti dan plasma belum diketahui oleh Kab/kota yang menangani fungsi peternakan
- Sulit mendapatkan data detail usaha seperti modal usaha, kapasitas produksi, dan omset usaha

Beberapa faktor pendorong yang ada di program Program Perizinan Usaha Pertanian adalah sebagai berikut:

- Komitmen bersama dan koordinasi baik secara internal dan eksternal pada kabupaten kota, peternak, dan perusahaan kemitraan
- Komitmen bersama dan koordinasi baik secara internal dan eksternal pada kabupaten kota dan DPMPTSP

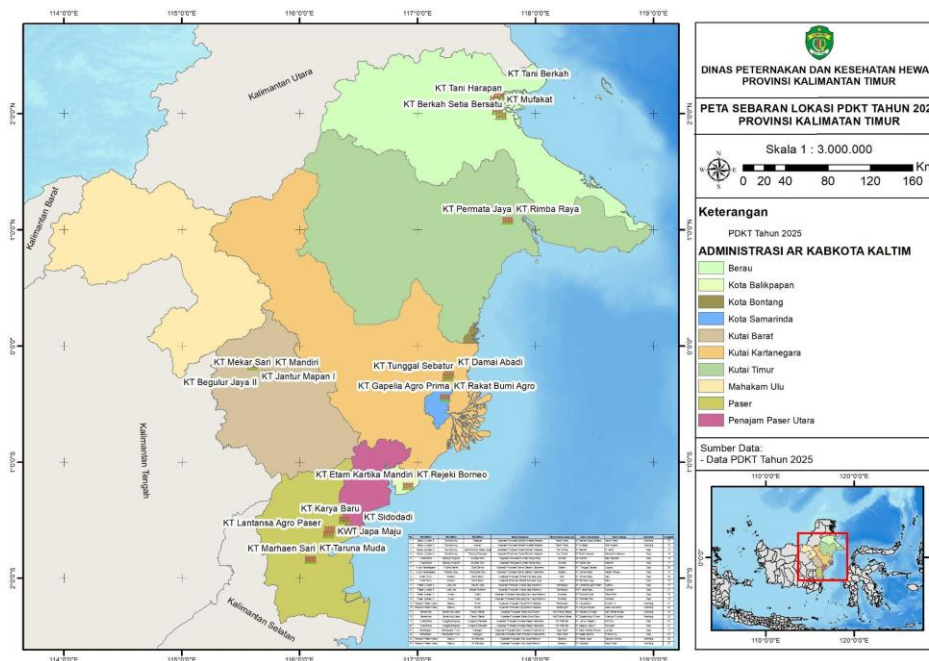
Tindak lanjut:

- Berkoordinasi dengan pihak Kab/kota, perusahaan kemitraan, peternak terkait proses penandatanganan perjanjian kerjasama
- Berkoordinasi dengan pihak Kab/kota, DPMPTSP terkait data peran swasta sektor peternakan

IV. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian memiliki outcome Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan dengan skor capaian kinerja 100 dari target 99,73 persentase 100,27%. Realisasi keuangan sebesar Rp2.194.896.245,00,- dari pagu Rp2.301.747.134,00,- dengan persentase 85,19%. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian memiliki indikator sebagai berikut:
 - a. Rasio SD komoditas/ produk peternakan
Realisasi capaian kinerja mendapatkan rasio SD komoditas/produk peternakan 1,17 dari target rasio 1,15 persentase 100,27%.
 - b. Persentase jumlah peternak milenial
Realisasi capaian jumlah peternak milenial adalah 237 orang dari target 100 orang dengan persentase 237%. Aktivitas indikator ini adalah melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan peternak milenial. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut menysasar 10 kelompok peternak dengan total peserta sebanyak 116 orang. (Kutai Timur 20 orang, Kutai Kartanegara 20 orang, Berau 12 orang, Kutai Barat 20 orang, Balikpapan 21 orang dan PPU 23 orang)
 - c. Jumlah pembudidaya unggas
Realisasi capaian kinerja jumlah budidaya unggas sebanyak 49.158 RTUP dari target 49.158 RTUP dengan persentase 100%. Pada tahun 2025 pembudidaya unggas yang mendapat pembinaan (RTUP) di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 22 KK dan Kota Bontang sebanyak 28 KK.
 - d. Jumlah Desa Korporasi Ternak
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan memiliki indikator Jumlah Desa Korporasi Ternak dengan realisasi capaian 12 unit PDKT dari target 12 unit persentase 100%. Desa Korporasi Ternak terdapat di 8 Kab/Kota (Balikpapan 1 unit, Berau 2 unit, Kubar 2 unit, Kukar 1 unit, Kutim 1 unit, Paser 2 unit, Samarinda 1 unit, dan Penajam Paser Utara 2 Unit). Pengembangan Desa Korporasi Ternak yaitu 1 (satu) unit DKT terdiri dari 2 kelompok yang berada di desa yang berdekatan. Sebaran PDKT dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Peta Sebaran Desa Korporasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2025

Beberapa faktor penghambat yang ada di program Program Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut:

- Data/Informasi yang tidak rutin dan detail dari para pelaku usaha peternakan (produsen/ritel) maupun konsumen
- Belum adanya informasi lengkap jumlah peternak muda (millennial) di kabupaten/kota
- Sumber Data yang kurang update pada informasi Data Kementerian Sosial
- Karakter kelompok yang berbeda pada 2 (dua) kelompok yang bergabung dalam PDKT

Beberapa faktor pendorong yang ada di program Program Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut:

- Harus adanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan produk peternakan yang dikonsumsi masyarakat.
- Harus adanya regenerasi para peternak muda (millennial) sehingga usaha peternakan bisa menjadi salah satu usaha yang diminati dan lebih menguntungkan.
- Memberikan bantuan modal usaha beternak skala kecil kepada masyarakat miskin.
- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Usaha kelompok ternak

Tindak lanjut:

- Melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha peternakan (produsen/ritel) maupun konsumen agar mendapatkan data yang akurat dan detail.
- Membuat pengembangan sistem pelaporan/pendataan peternak muda/milenial.
- Melakukan verifikasi data masyarakat peternak unggas skala kecil.
- Melakukan fasilitasi usaha bersama dalam bentuk Koperasi untuk 2 (dua) kelompok yang saling berdekatan lokasinya

Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak

Indikator sasaran strategis 2 (dua) adalah :

1. **Produksi Daging**
2. **Produksi Telur**
3. **Produksi Aneka Ternak Lainnya**

Pangan asal ternak sangat penting karena berkontribusi besar terhadap gizi, kesehatan, dan ketahanan pangan Masyarakat. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Kurangnya konsumsi protein hewani dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti stunting pada anak, anemia, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik. Kesadaran akan pentingnya konsumsi protein hewani juga dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk peternakan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor peternakan dan kesejahteraan peternak lokal. Kebutuhan pangan asal ternak ini belum semuanya terpenuhi dari produksi lokal sehingga masih mendatangkan daging dari luar wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 33. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100)$	
2	Meningkatnya produksi pangan asal ternak (*)	1. Produksi daging	Ton	TW I	19.442,32	18.724,70	96,31
				TW II	38.886,65	39.063,05	100,45
				TW III	58.329,98	57.835,54	99,15
				TW IV	77.773,30	83.460,57	107,31
		2. Produksi telur	Ton	TW I	3.949,80	4.130,67	104,58
				TW II	7.899,60	8.364,28	105,88
				TW III	11.849,40	12.644,41	106,71
				TW IV	15.799,20	13.671,83	86,53
		3. Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	TW I	45,92	49,77	108,38
				TW II	91,85	95,16	103,60
				TW III	137,78	142,33	103,30
				TW IV	183,70	189,03	102,90
Capaian Kinerja Sasaran 2						98,92	

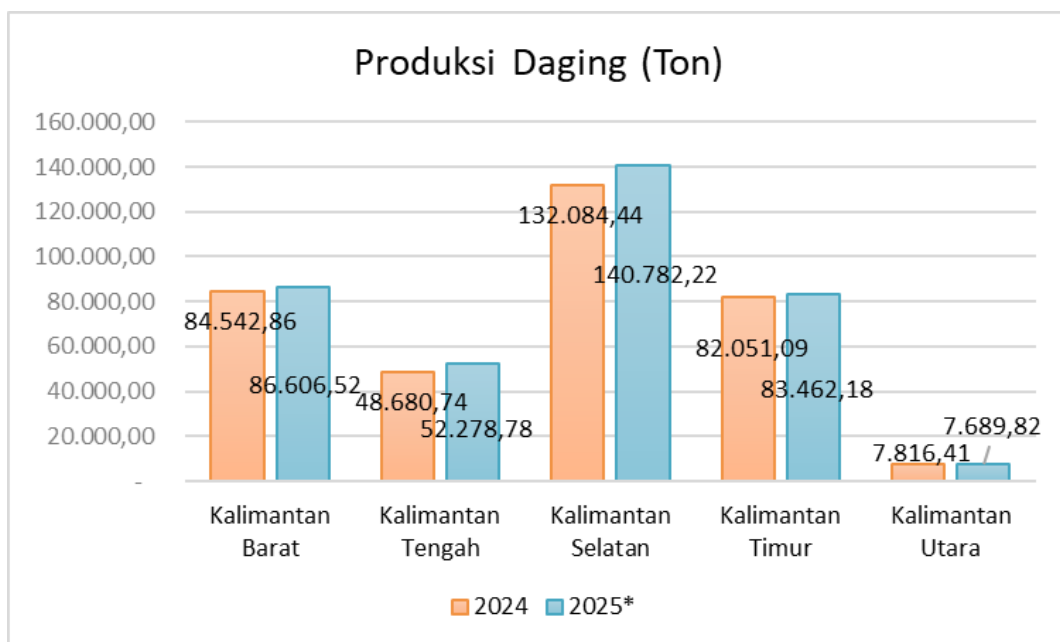
**Angka Sementara Data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2025)

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata produksi daging dan telur mencapai 98,92% yaitu produksi daging sebesar 107,31%, produksi telur sebesar 86,53 dan produksi aneka ternak lainnya 102,90%.

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan 2025

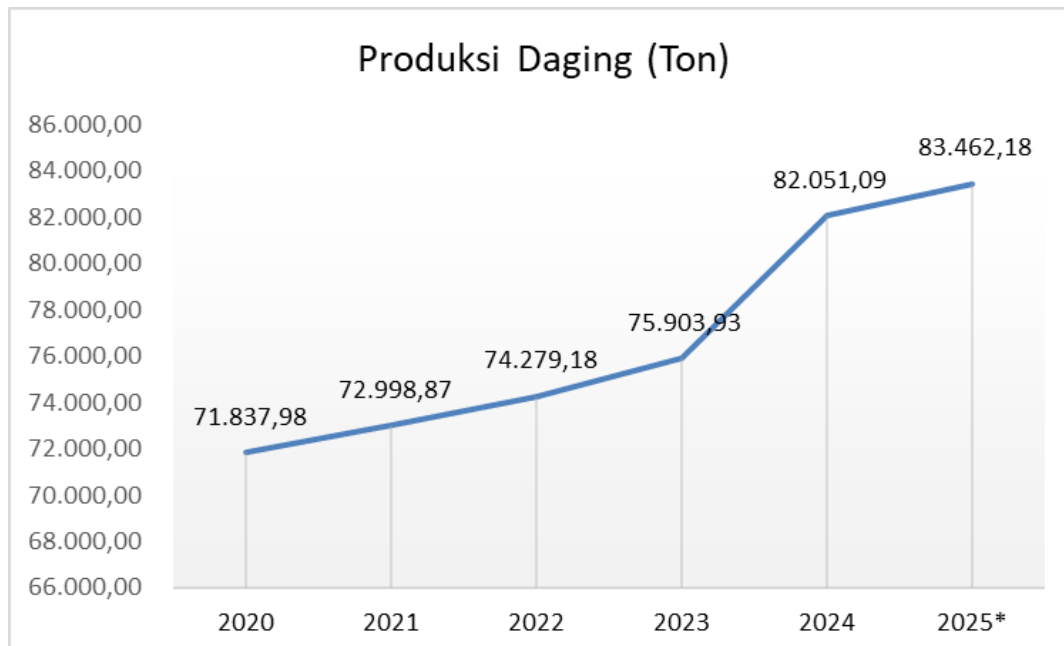
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan/ Tahun 2022
			2024	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Produksi Daging	Ton	82.051,09	83.460,57	1,72
2	Produksi Telur	Ton	13.542,52	13.671,83	0,95
3	Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	175,61	189,03	7,64

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa produksi daging mengalami peningkatan sebesar 1.411,09 ton atau 1,72%, dari 82.051,09 ton menjadi 83.460,57 ton untuk produksi telur mengalami peningkatan (0,95%) atau sebanyak 129,31 ton dari 13.542,52 ton menjadi 13.671,83 sedangkan pada produksi aneka ternak lainnya mengalami kenaikan 7,64% sebanyak 13,42 dari 175,61 ton menjadi 189,03 ton. Realisasi produksi daging Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan produksi daging se-Kalimantan adalah sebagai berikut:



Grafik 3. Produksi Daging Kalimantan Tahun 2024-2025

Kalimantan Timur mengalami kenaikan produksi +1,72% dari 82.051,09 ton (2024) menjadi 83.462,18 ton (2025). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga dalam volume produksi setelah Kalimantan. Produksi daging Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan tertinggi (+7,39%), yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas peternakan atau ekspansi sektor peternakan di wilayah tersebut.



Grafik 4. Produksi Daging (ton) Tahun 2020-2025

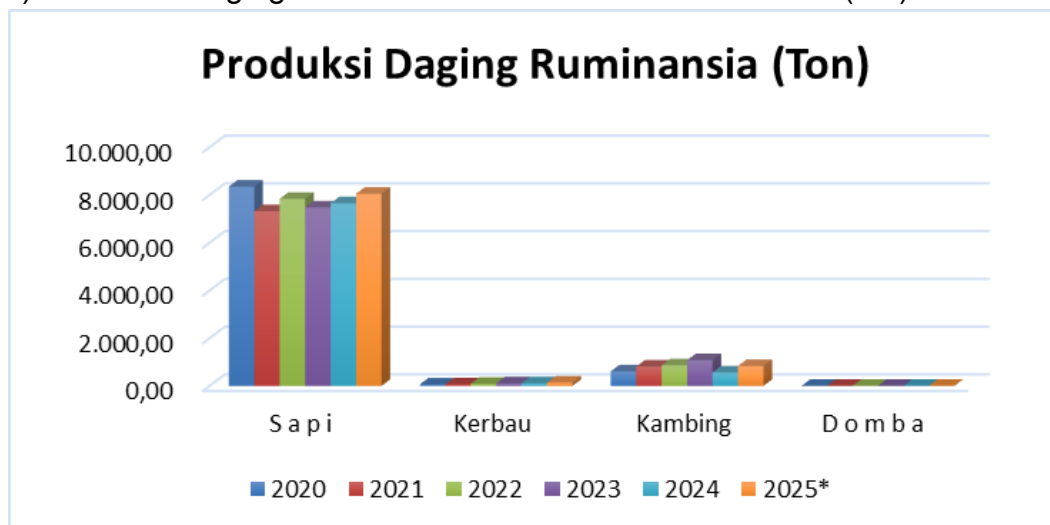
Pada grafik terlihat produksi daging selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar 71.837,98 ton sampai tahun 2025 sebesar 83.462,18 ton. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan menyebabkan kenaikan jumlah konsumsi daging di Kalimantan Timur. Produksi daging secara keseluruhan pada tahun 2025 mencapai 83.462,18 ton mengalami kenaikan sebesar 1,72% atau 1.441,09 ton dari tahun 2024 yaitu 82.051,09 ton.

Produksi daging mengalami peningkatan karena meningkatnya populasi di Kalimantan Timur. Namun produksi daging Kalimantan Timur belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi daging masyarakat Kalimantan Timur yang mencapai 113.836,74 ton/tahun pada Tahun 2025, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging masih mendatangkan daging dan produk olahan

daging dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya populasi ternak yang terbatas, bergesernya minat konsumsi dari daging segar ke daging beku, keterbatasan lahan untuk pakan dan kawasan peternakan dan adanya penyakit hewan yang dapat mempengaruhi produksi daging.

Produksi Daging dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis ternak sebagai berikut:

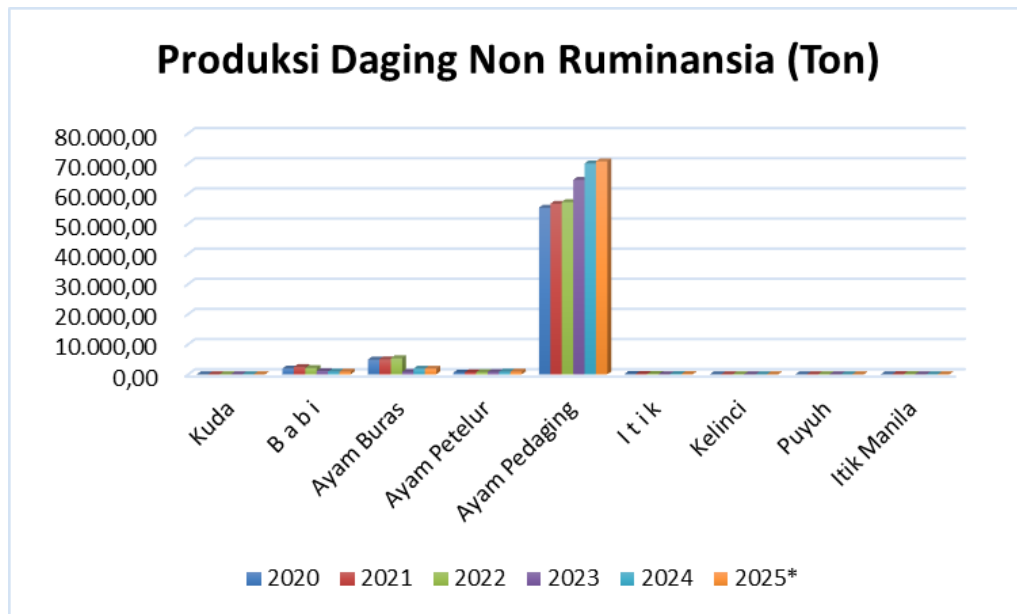
a) Produksi Daging Ternak Ruminansia Tahun 2020-2025 (ton)



Grafik 5. Produksi Daging Ternak Ruminansia

Pada grafik diatas dapat dilihat produksi daging ruminansia memiliki produksi tertinggi pada daging sapi yang selama 2020-2025 mengalami fluktuasi, pada tahun 2025 produksi daging sapi 8.051,46 ton dan pada tahun 2024 7.651,60 ton. Produksi ternak ruminansia paling rendah berada di ternak domba pada tahun 2025 sebanyak 5,84ton.

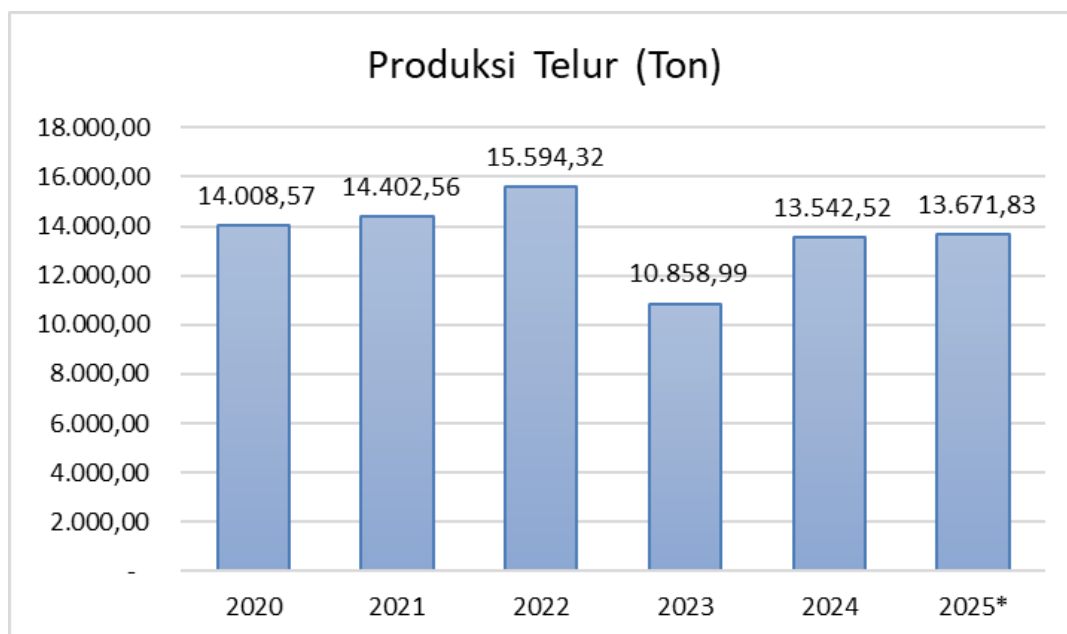
b) Produksi Daging Non Ruminansia Tahun 2020-2025 (ton)



Grafik 6. Produksi Daging Non Ruminansia (ton) Tahun 2020-2025

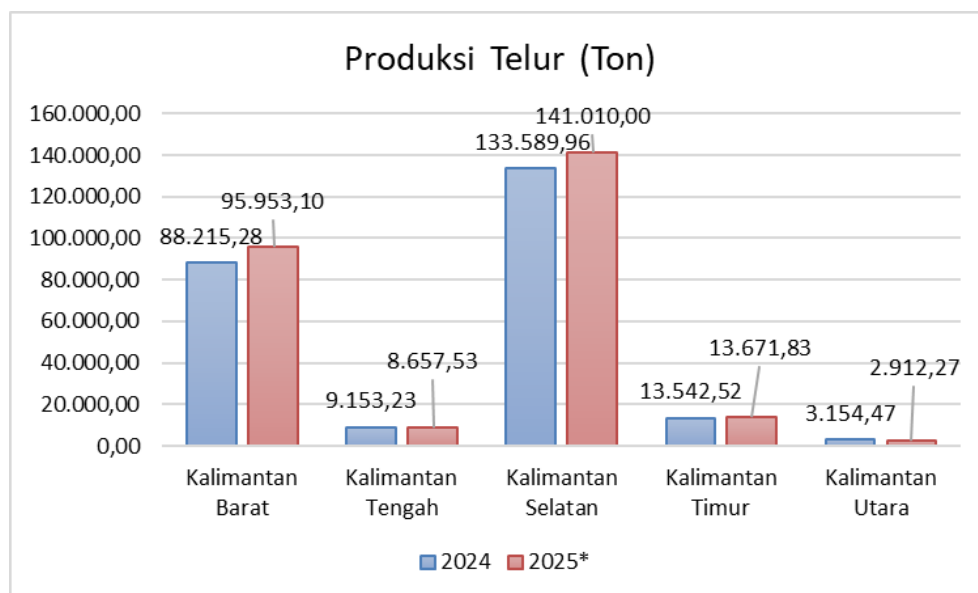
Produksi daging non ruminansia memiliki produksi paling besar terdapat pada produksi ayam broiler atau ayam pedaging pada Tahun 2025 mencapai 70.661,86 ton, produksi ayam pedaging mengalami fluktuasi produksi selama 2020-2025, kontribusi terbesar berikutnya terdapat pada produksi daging ayam buras 1.884,86 ton dan produksi daging babi 900,25 ton.

1. Produksi Telur (ton) Tahun 2020-2025



Grafik 7. Produksi Telur

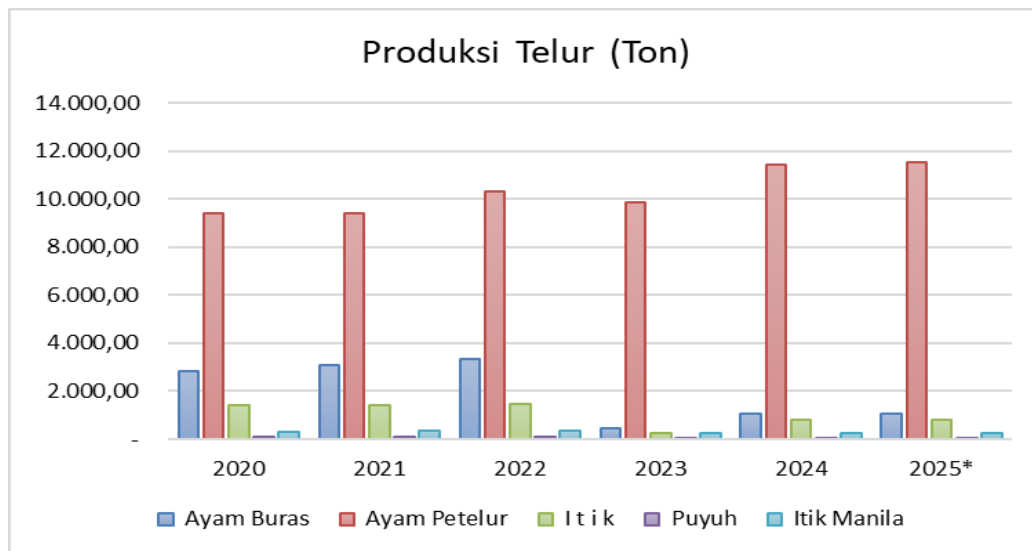
Pada grafik dapat dilihat bahwa adanya produksi telur dari tahun 2020-2025 mengalami fluktuatif. Produksi telur secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2024 mencapai 13.542,52 ton/tahun dan pada tahun 2025 produksi telur sebesar 13.671,83 ton mengalami peningkatan 129,31 ton, sedangkan konsumsi telur mencapai 37.391,55 ton tahun 2025 sehingga produksi telur belum dapat mencukupi konsumsi telur di Kalimantan Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi telur antara lain UMP Kalimantan timur yang tinggi serta topografi lahan yang sulit menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga kurangnya minat pengusaha untuk membuka usaha peternakan di Kalimantan Timur, kurangnya lahan pakan dan bahan baku pakan untuk unggas, dan peningkatan penyakit Avian Influenza (AI / Flu Burung) pada tahun 2025. Jika realisasi produksi Pulau Kalimantan dibandingkan akan menghasilkan grafik sebagai berikut:



Grafik 8. Produksi Telur Kalimantan Tahun 2024-2025

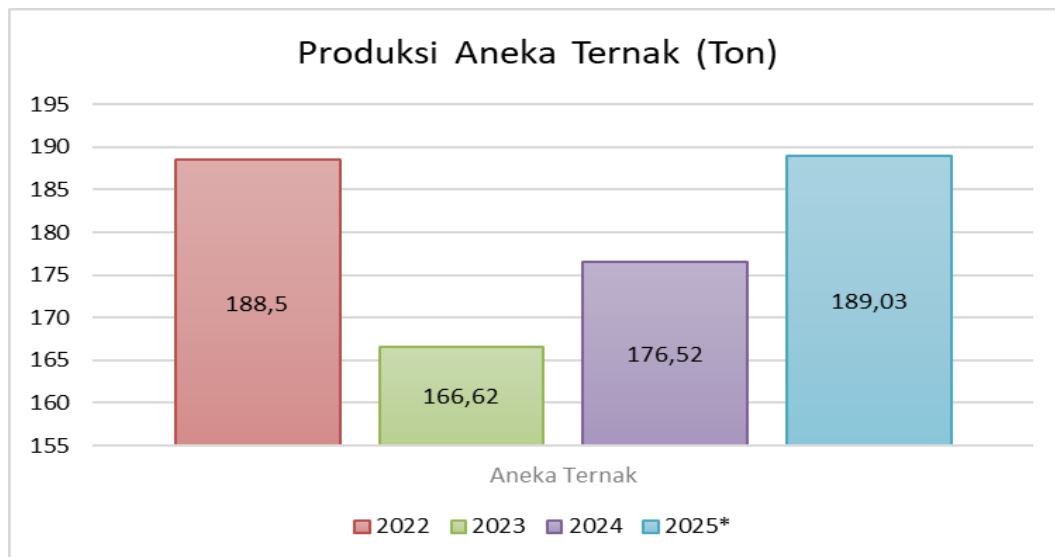
Produksi telur pada Kalimantan Timur berada pada posisi ke-3 (tiga) dibawah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang mencapai produksi pada Tahun 2025 95.953,10 ton dan 141.010,00 ton. Produksi telur pada Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masih di bawah 10.000 ton atau pada tahun 2025 8.657,53 ton dan 2.912,27 ton. Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara yang mengalami penurunan. Produksi tinggi pada Kalimantan Selatan jika

dibandingkan dengan Kalimantan Timur karena, Tradisi peternakan yang lebih kuat, lahan hijau dan sumber pakan yang lebih tersedia, dan akses pasar dan infrastruktur distribusi yang lebih baik. Di Kalimantan Timur, sebagian besar masyarakat lebih fokus pada sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet) serta industri pertambangan, bukan peternakan.



Grafik 9. Produksi Telur Berdasarkan Jenis Ternak Tahun 2020-2025 (ton)

Pada grafik diatas dapat dilihat produksi telur dari masing-masing komoditas ternak unggas, pada tahun 2025 untuk produksi telur tertinggi berasal dari ayam petelur dengan 11.552,73 ton dan yang terendah berasal dari puyuh dengan 1,86 ton. Pada tahun 2025 produksi telur ayam petelur mengalami kenaikan dari 11.438,35 ton menjadi 11.552,73 ton. Pada Tahun 2025 rata-rata produksi telur masing-masing komoditas mengalami kenaikan kecuali telur puyuh.



Grafik 10. Produksi Aneka Ternak Lainnya (ton) 2022-2025

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2022-2025 mengalami fluktuasi, pada tahun 2025 mengalami kenaikan produksi aneka ternak (walet, madu kelulut dan maggot) dari 176,52 ton menjadi 189,03 ton atau sebesar 7,09%. Hal ini disebabkan Permintaan sarang burung wallet untuk kebutuhan ekspor di Indonesia terus meningkat sehingga mendorong peningkatan produksi.

Tabel 35. Realisasi Sasaran 2 (dua) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
1	Produksi Daging	Ton	79.717,60	83.460,57	104,70
2	Produksi Telur	Ton	16.352,20	13.671,83	83,61
3	Produksi Aneka Ternak Lainnya	Ton	192,88	189,03	98,00

- Dari tabel di atas, produksi daging tahun 2025 mencapai 83.460,57 ton sedangkan target akhir Renstra sebesar 79.717,60 ton, sehingga telah mencapai target akhir Renstra. Produksi telur tahun 2025 mencapai 13.671,83 ton bila dilihat dari target akhir Renstra sebesar 16.352,2 ton sehingga belum mencapai target dan masih terdapat kekurangan 2.680,37 ton. Produksi Aneka Ternak Lainnya mencapai target 189,03 ton dari target akhir renstra 192,88 ton, diharapkan produksi daging,

produksi telur dan produksi aneka ternak lainnya terus meningkat untuk pemenuhan konsumsi protein masyarakat Kalimantan Timur.

- Faktor Penghambat yang ditemui dalam mencapai produksi pangan asal ternak adalah sebagai berikut :
- Sebagian besar bahan pakan ternak masih bergantung pada pasokan dari luar daerah maupun impor, sehingga menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi.
- Ketersediaan lahan untuk pengembangan subsektor peternakan di Kalimantan Timur masih terbatas.
- Kompetensi dan pemahaman peternak mengenai manajemen peternakan modern belum merata.
- Terjadi kenaikan harga pakan ternak yang berdampak pada meningkatnya biaya usaha.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan, khususnya untuk pengembangan komoditas aneka ternak seperti madu kelulut, walet, dan maggot.
- Akses terhadap informasi pasar guna memperluas jaringan pemasaran produk masih terbatas.
- Perubahan cuaca ekstrem berpotensi mengganggu populasi walet serta menurunkan produksi sarang.
- Sebagian peternak masih menerapkan pola budidaya tradisional dan belum optimal memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat budidaya maggot sebagai alternatif pakan ternak dan solusi pengolahan limbah organik masih rendah.
- Produksi maggot sangat bergantung pada ketersediaan limbah organik, sehingga ketidakstabilan pasokan dapat menghambat proses budidaya.
- Tidak seluruh jenis lebah kelulut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam menghasilkan madu.
- Pada musim hujan, produksi madu kelulut cenderung menurun karena lebah lebih berfokus pada mempertahankan kelangsungan hidup.

- Produk madu kelulut masih menghadapi kendala terkait pemenuhan standar mutu serta pengembangan pasar, baik di tingkat domestik maupun ekspor.

Faktor Pendorong yang mendukung dalam mencapai target produksi daging dan telur adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi mendorong peningkatan permintaan daging, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri pengolahan pangan.
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi stimulus bagi pengembangan sektor peternakan guna memenuhi lonjakan kebutuhan daging.
- Dukungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui program pengembangan desa korporasi ternak turut memperkuat peningkatan produksi daging.
- Peningkatan kesejahteraan peternak serta sertifikasi wilayah Kalimantan Timur memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha peternakan.
- Permintaan pasar terhadap produk hewani terus menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan bertambahnya konsumsi produk peternakan setiap tahun.
- Penerapan inovasi dan teknologi modern dalam budidaya walet mendukung peningkatan produktivitas.
- Maggot dimanfaatkan sebagai alternatif sumber protein yang ekonomis dan ramah lingkungan untuk pakan ternak seperti ikan, unggas, dan reptil.
- Budidaya maggot juga berperan dalam mengurangi limbah organik dengan mengolahnya menjadi pupuk organik dan pakan bernilai gizi tinggi.
- Pengembangan lebah kelulut relatif lebih mudah dibandingkan lebah madu konvensional karena tidak memerlukan perawatan yang terlalu intensif.
- Penugasan kepada Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis untuk menyiapkan data harga produsen, harga konsumen, serta data

ketersediaan dan kebutuhan ayam serta telur guna mendukung perencanaan yang lebih akurat.

- Penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target produksi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Merancang dan menetapkan program kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia.
- Menyusun program penyuluhan guna memperluas akses terhadap informasi pasar bagi pelaku usaha peternakan.
- Mempermudah proses perizinan serta membuka peluang ekspor melalui regulasi yang lebih kondusif dan berpihak pada pelaku usaha.
- Melakukan koordinasi dalam penyediaan lahan khusus untuk padang penggembalaan sebagai sumber pakan ternak.
- Mengembangkan program pelatihan terkait penerapan teknologi modern dalam pemeliharaan ternak, manajemen pakan, dan pengendalian kesehatan hewan.
- Memperkuat dan melanjutkan program desa korporasi ternak pada tahun berikutnya.

Tabel 36. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 2 (dua)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%Rata-rata Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak	Produksi Daging Produksi Telur Produksi Aneka Ternak Lainnya	98,92	89,29	9,63

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 2 sangat baik. Hal ini menunjukkan rata-rata capaian kinerja produksi daging, produksi telur dan produksi aneka ternak lainnya sebesar 98,92% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 89,29% dengan tingkat efisiensi mencapai 9,63%. Serapan anggaran 89,29% atau sebesar Rp 56.246.627.802,00,- dari Rp

62.992.353.273,00,-. Artinya untuk mencapai target sasaran 2 (dua) masih bisa dilakukan efisiensi dalam mencapai capaian kinerja.

Tabel 37. Tabel Perbandingan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Mencapai Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak	Produksi Daging	%Capaian Kinerja	100,27	101,72	103,52	101,06	98,92
		Produksi Telur	%Realisasi Anggaran	74,53	85,64	96,61	95,92	89,29
		Produksi Aneka Ternak Lainnya	Tingkat Efisiensi	25,74	16,08	6,91	5,14	9,63

Pada sasaran kedua Meningkatkan Produksi Pangan Asal Ternak memiliki tingkat efisiensi Tahun 2021 (25,74), Tahun 2022 (16,08), Tahun 2023 (6,91), Tahun 2024 (5,14) dan Tahun (9,63) Nilai (+) tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien terhadap capaian kinerja. Tercapainya sasaran 2 (dua) ini didukung 3 (tiga) program yaitu:

- (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Prasarana Pertanian;
dan
- (3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tabel 38. Program/Kegiatan APBD yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 2 (dua).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	88,00	98,56	112	43.737.435.565,00	40.791.296.198,00	93,26
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB	Ekor	225,00	225,00	100	3.039.249.699,00	2.570.312.821,00	84,57
	Persentase Akseptor IB dari Indukan	%	13,00	22,28	171,38			
	Persentase Calving Rate	%	61,50	59,80	97,24			
	Persentase pertumbuhan closed house	%	60,00	61,56	102,6			
	Jumlah Usaha Ternak (aneka)	UnitUsaha	119,00	119,00	100			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
	ternak/plasma nutfah)							
	Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar	%	1,85	0,85	154,05			
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	100	1.727.349.143,00	1.405.372.929,00	81,36
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan	3,00	3,00	100	1.311.900.556,00	1.164.939.892,00	88,8

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan	Unit	31,00	42,00	135,48	4.027.525.865,00	3.636.221.458,00	90,28
	Luasan HPT	Ha	1.225,00	1.225,00	100			
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan	1,00	1,00	100	2.457.470.590,00	2.248.179.250,00	91,48
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen	1,00	1,00	100	1.570.055.275,00	1.388.042.208,00	88,41
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	%	47,30	47,00	99,37	314.820.636,00	311.001.421,00	98,79
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat	Laporan	4,00	4,00	100	314.820.636,00	311.001.421,00	98,79

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
	Hewan yang Beredar							
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	Indukan/Bibit	4.700,00	5.355,18	113,94	34.371.736.297,00	32.630.656.229,00	94,93
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor	3.762,00	3.772,16	100,27	34.371.736.297,00	32.630.656.229,00	94,93
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,72	100,00	100,28	14.506.836.592,00	10.378.470.776,00	71,54
Penataan Prasarana Pertanian	Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	Ha	155,00	167,00	107,74	14.506.836.592,00	10.378.470.776,00	71,54
	Jumlah Akses pembiayaan	MilyarRupiah	120,00	156,00	130			

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan	unit	4,00	4,00	100			
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1,00	1,00	100	14.506.836.592,00	10.378.470.776,00	71,54
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	92,41	92,48	100,08	10.185.095.964,00	9.751.567.960,00	95,74
	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,81	100,00	104,37			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis	%	20,00	23,30	116,5	5.838.117.614,00	5.555.304.629,00	95,16

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut)	Kecamatan	68,00	78,00	114,71			
	Persentase pelayanan kesehatan hewan	%	45,80	50,23	109,67			
	Tingkat kesembuhan GANGREP	%	80,00	92,75	115,94			
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	12,00	12,00	100	2.100.803.127,00	2.040.434.441,00	97,13
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	35,00	40,00	114,29	418.870.136,00	406.340.715,00	97,01
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah	Laporan	12,00	12,00	100	3.054.861.419,00	2.862.663.215,00	93,71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Hewan dan Klinik Hewan	Sakit Hewan dan Klinik Hewan							
Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang	25,00	50,00	200	263.582.932,00	245.866.258,00	93,28
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	%	2,85	1,21	157,54	1.916.585.997,00	1.891.621.062,00	98,7
	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan	%	80,00	80,80	101			

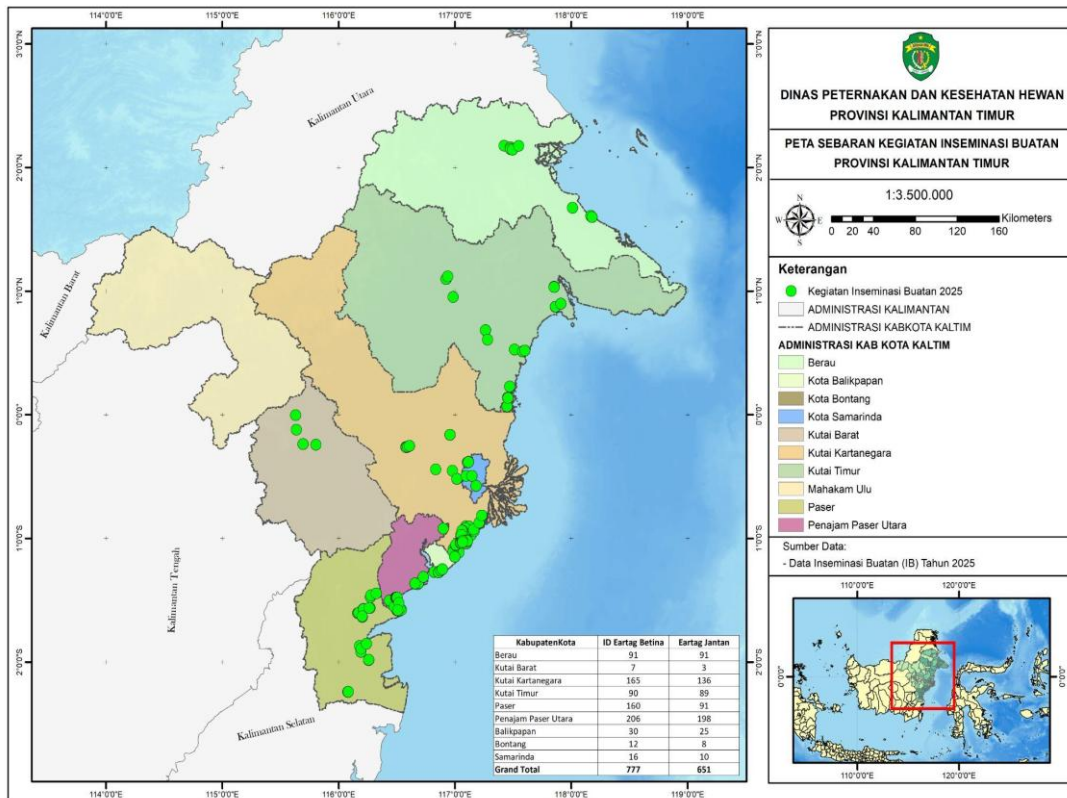
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Laporan	12,00	12,00	100	1.750.206.423,00	1.730.112.160,00	98,85
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	1,00	1,00	100	166.379.574,00	161.508.902,00	97,07

I. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program ini merupakan salah satu program prioritas, capaian program (outcome) ini adalah Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan dan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan mendapatkan skor 98,56 atau 112% dari target skor 88,00. Capaian Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mencapai skor 98,36 atau 99,63% dari target skor 98,73.

Tercapainya Outcome Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian didukung oleh 5 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Kegiatan ini memiliki indikator yang mendukung program sebagai berikut:
 - a. Jumlah Bibit Sapi ber-SKLB
Realisasi capaian kinerja jumlah bibit sapi yang ber-SKLB sebanyak 225 ekor dari target 225 ekor atau telah terealisasi 100%. Bibit sapi yang ber-SKLB berada di Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - b. Persentase Akseptor IB dari Indukan
Persentase Akseptor IB dari indukan mencapai 22,28% dari target 13,00% atau realisasi sebesar 171,38%. Realisasi 22,28% merupakan hasil dari 3.933 ekor betina produktif yang dilakukan IB dari total indukan 17.650 ekor indukan.



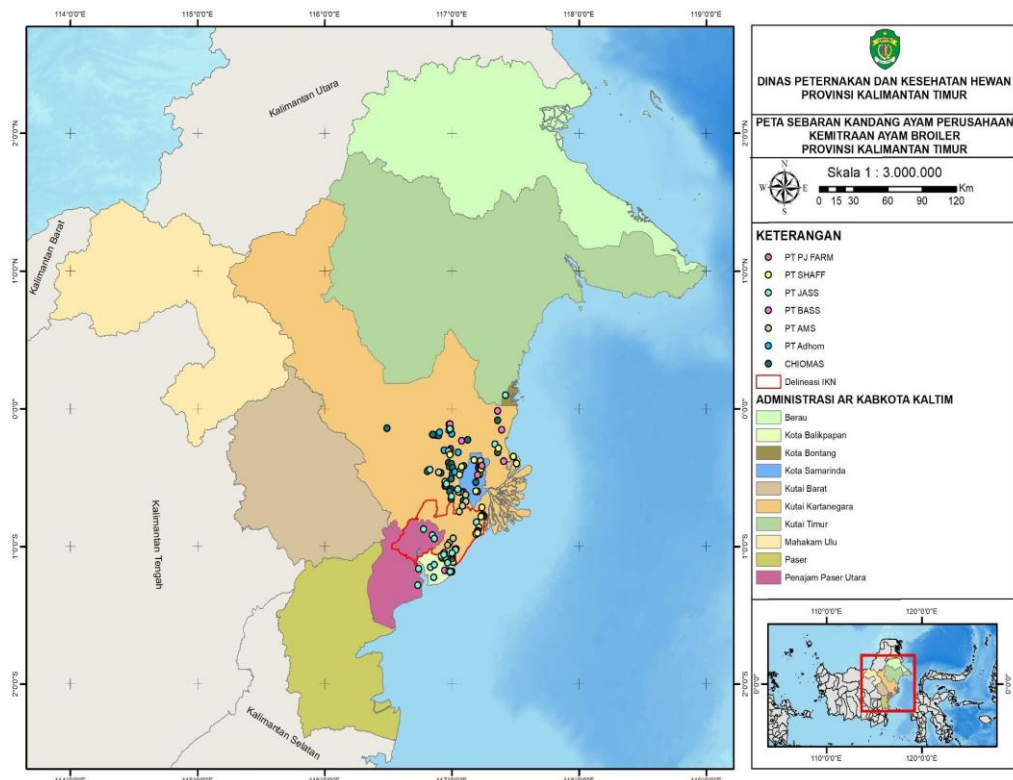
Gambar 2. Peta sebaran Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)

c. Persentase Calving Rate

Pada Tahun 2025 Persentase Calving Rate mencapai 59,80% dari target 61,50%. Calving rate adalah persentase keberhasilan kelahiran dari jumlah induk yang dikawinkan atau yang tersedia untuk beranak dalam periode tertentu. Semakin tinggi calving rate, semakin baik tingkat reproduksi ternak. Realisasi Kelahiran pada Tahun 2025 adalah 5.833 ekor dari ternak yang kawin IB dan kawin alam.

d. Pertumbuhan Upgrade Closed House

Terdapat 61,56% closed house yang telah di upgrade pada tahun 2025 dari target 60% atau realisasi capaian 102,6%. Kandang closed house tersebar di 5 (lima) Kab/kota yaitu Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara dan Samarinda.



Gambar 3. Peta sebaran Kandang Ayam Broiler

- e. Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah)

Realisasi capaian kinerja jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nutfah) sebanyak 119 unit usaha dari target 119 unit usaha atau 100,00% yang tersebar di 8 (tujuh) Kab/Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Paser, Bontang, Berau dan Samarinda.
 - f. Penurunan Jumlah DOC Kualitasnya dibawah Standar

Jumlah DOC yang kualitasnya dibawah standar mengalami penurunan dari target 1,85% menjadi 0,85% dengan realisasi capaian kinerja 154,05%. Data DOC berasal dari Perusahaan Kemitraan dan Peternak di Kab/Kota Kutai Kartanegara, Berau dan Balikpapan.
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - a. Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan

Realisasi jumlah pengolahan pakan, bank pakan sebanyak 42 unit dari target 31 unit atau 135,48% yang telah diberikan ke 42 kelompok PDKT di 8 (delapan) Kab/kota yaitu Balikpapan, Samarinda, Paser, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara.

b. Luasan HPT

Luasan HPT pada Tahun 2025 realisasi mencapai 98,52 seluas 1.225 Ha dari target 1.225 Ha. Luasan HPT didukung dengan aktivitas penanaman HPT di 9 (Sembilan) Kab/Kota Balikpapan, Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Paser, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

3) Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman realisasi mencapai 47% dari target 47,30%. Terdapat 19 unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu di 6 Kab/kota yaitu Kutai Kartanegara, Bontang, Balikpapan, Berau, Samarinda, dan Paser

4) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain memiliki indikator jumlah pengadaan ternak, realisasi kinerja jumlah pengadaan ternak pada tahun 2025 berjumlah 5.355 indukan/bibit dari target 4.700 indukan/bibit. Realisasi kab/kota terdiri dari Sapi sebanyak 1.302 ekor, Kerbau 10 ekor, Kambing PE/Jawarandu 302 ekor, Kambing boer 513 ekor dan Babi 516 ekor dan realisasi provinsi 2712 ekor.

5) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi merupakan kegiatan dari UPTD Pembibitan Hijauan Pakan Ternak (PTHPT) yang mendukung sasaran meningkatnya pangan asal ternak, didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut:

a. Angka kelahiran

Realisasi angka kelahiran kinerja tahun 2025 mencapai 38,18% dari target 26,10%. Selama tahun 2025 di UPTD PTHPT jumlah kelahiran ternak di UPTD PTHPT sebanyak 42 ekor (Jantan 23 ekor dan Betina 19 ekor)

b. Angka Mortalitas atau Kematian Ternak/Hewan

Kematian ternak di UPTD PTHPT sebanyak 2,02% dari target 2,05% semakin rendah persentase maka semakin baik realisasi kinerja.

c. Calving Interval

Realisasi kinerja calving interval mencapai 12,62 bulan dari target 16,66 bulan dengan capaian yang sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa jarak waktu antara kelahiran sapi indukan berlangsung lebih cepat dari yang ditargetkan. Secara teknis, kondisi ini mencerminkan semakin efisiennya kinerja reproduksi ternak, dimana indukan mampu kembali bunting dan melahirkan dalam waktu yang lebih singkat. Calving interval yang semakin pendek akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas indukan dan percepatan pertumbuhan populasi ternak. Semakin lama PPE dan PPM serta tingginya nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari.

d. Jumlah PAD

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp249.794.519 di tahun 2025 atau 115,75% dari target Rp215.805.200 rincian :

- Retribusi Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan Villa pada pemakaian mess, gedung pelatihan, guest house, pemakaian rumah dinas sebesar Rp18.750.000
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada retribusi karcis masuk sebesar Rp18.810.000
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah pada penjualan ternak bibit, ternak non bibit, bibit HMT, dan pupuk kandang sebesar Rp212.231.200

e. Jumlah Populasi Ternak/Hewan

Populasi ternak pada tahun 2025 mencapai 214,72 ST dari target 194 ST atau realisasi capaian 110,68%. Pada UPTD PTHPT populasi Rusa Sambar 185 ekor, Sapi Bibit 174 ekor dan Ayam 834 ekor.

- f. Persentase jumlah ternak yang ber-SKLB
Realisasi ternak yang ber-SKLB mencapai 11,90% dari target 5%. Kelahiran sapi bali tahun 2025 pada UPTD PTHPT berjumlah 42 ekor dan 5 ekor yang memenuhi SKLB.
- g. Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi
Produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi sebanyak 197.256 stek/pols dari target 120.000 stek/pols tersebar di Kab/kota Penajam Paser Utara, Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Barat, Balikpapan dan Bontang. Jenis rumput yang didistribusikan antara lain Gama umami, Pakchong, BH, Zanzibar dan Biograss.
- h. Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan Pakan Tambahan
Produksi hijauan pakan ternak dan pakan tambahan terealisasi 1.779,66 ton dari target 1.800 ton. Jenis rumput produksi HPT dan pakan tambahan antara lain BH, Rumput gajah, Pakchong, Zanzibar, Gama Umami dan Pakan Olahan.
- i. Jumlah produksi pupuk
Produksi pupuk pada tahun 2025 mencapai 28,65 ton dari target 20 ton. Produksi pupuk yang dihasilkan berupa pupuk padat, pupuk cair dan pupuk urine.

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan dilapangan terkendala dengan ketersediaan sapi bibit yang sesuai dengan SNI dan kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)/Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penerbitan SKLB di tingkat petani/peternak
- Adanya dan masih seringnya terjadi Maintenance/perbaikan pada Aplikasi IDENTIK PKH, yang membuat petugas kesulitan melaporkan kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan menjadi malas untuk melaporkan kegiatan yang berdampak pada rendahnya capaian kegiatan Optimalisasi Reproduksi pada IDENTIK PKH, walaupun pelaksanaan kegiatan di lapangan cukup baik
- Investasi tinggi, Biaya Produksi yang tinggi dan Data Populasi yang fluktuatif/kurang akurat
- Manajemen Pemeliharaan yang masih tradisional (kurang biosekuriti), Biaya Produksi yang tinggi, dan Data Populasi yang fluktuatif/kurang akurat

- Perbedaan tujuan pemberian bantuan oleh OPD lain Perbedaan kriteria penerima bantuan

Beberapa faktor pendorong dalam menjalankan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- Adanya Alokasi Biaya Operasional Pengukuran Ternak. Adanya data Kelahiran. Adanya Potensi sapi Bibit di Kabupaten/Kota. Adanya dukungan tenaga petugas lapangan di Kab/Kota
- Tersedianya data Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Reproduksi di IDENTIK PKH dan data dari Recorder di Kab/Kota, serta data Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
- Dukungan Regulasi, Inovasi Teknologi dan Kelembagaan yang kuat

Upaya yang dilakukan untuk mendukung Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mempersiapkan ternak sapi sebelum pelaksanaan pengukuran, serta memastikan seluruh wilayah dapat terakomodir dalam kegiatan optimalisasi reproduksi melalui pemenuhan sarana dan prasarana.
- Mengikutsertakan petugas di tingkat kabupaten/kota dalam bimbingan teknis (bimtek) optimalisasi reproduksi untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Melakukan sosialisasi secara aktif mengenai manfaat dan keuntungan (benefits) yang diperoleh peternak jika menerapkan sistem peternakan modern, seperti kandang tertutup (close house).
- Berkoordinasi dengan lembaga keuangan (seperti Bank atau Bank Indonesia) untuk memfasilitasi pemberian bantuan modal bagi peternak, guna mengatasi tantangan tingginya biaya investasi dan produksi.
- Melakukan koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang memiliki program bantuan di bidang peternakan, guna menyelaraskan tujuan dan kriteria penerima bantuan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

- Melakukan peningkatan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

a. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Rata-rata capaian pada Program penyediaan dan pengembangan prasarana yaitu 112,58% dengan capaian keuangan mencapai 71,63% atau Rp 10.391.095.479,00,- dari Rp14.506.836.592,00,-. Capaian outcome dari program ini adalah Tingkat pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi skor 100 dari target 99,72 skor atau 100,28.

Program ini didukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator sebagai berikut:

a. Jumlah Investasi di Bidang Peternakan

Realisasi jumlah investasi di bidang peternakan sebanyak 4 unit dari target 4 unit atau 100% yaitu dengan PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera dengan komoditas sapi potong, kambing, ayam di Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan lahan eks tambang, PT. Ayam Makmur dengan komoditas ayam di Kota Samarinda dengan lahan peternakan, PT. Gunta Samba dengan komoditas sapi di Kabupaten Berau menggunakan lahan perkebunan sawit, dan PT. Sungai Berlian Bhakti dengan komoditas sapi, kambing di Kabupaten Berau menggunakan lahan eks tambang.

b. Jumlah Nilai Akses pembiayaan

Realisasi akad kredit dan jumlah debitur pada tahun 2025 sub sektor peternakan mencapai akad kredit Rp51.097.900.000. Realisasi capaian mencapai 156 Miliar Rupiah atau 130% dari target 120 Miliar Rupiah.

c. Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan

Kawasan pemanfaatan untuk peternakan mencapai 167 Ha dari target 155 Ha atau 107,74% di 10 (sepuluh) Kab/kota dengan jumlah kelompok 166 kelompok tani.

II. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki 2 (dua) indikator outcome yaitu Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ dan Tingkat Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi capaian Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ yaitu 100,08% dengan skor 92,48 skor dari target skor 92,41%. Realisasi Capaian Tingkat pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner. Realisasi capaian Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ yaitu 104,37% dengan skor 100,00 skor dari target skor 95,81 skor. Capaian keuangan mencapai 95,74% atau sebesar Rp9.751.567.960,- dari pagu Rp10.185.095.964.-. Program ini didukung oleh beberapa indikator antara lain:

1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi didukung oleh beberapa indikator sebagai berikut:

a. Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut)

Capaian kinerja indikator Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut) adalah 23,30 atau 116,5 dari target 20,00. Pada tahun 2025 didapatkan rata-rata kecamatan tertular berdasarkan PHMSZ yaitu 2,625, kecamatan terkendali yaitu 2,125 dan kecamatan bebas PHMSZ yaitu 98,25. Dari 103 kecamatan terdapat 78 kecamatan bebas kasus PHMSZ dan 25 kecamatan yang terdampak kasus PHMSZ.

b. Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut)

Capaian kinerja indikator Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM, absolut) adalah 78,00 kecamatan atau 114,71 kecamatan dari target 68 kecamatan. Pada tahun 2025 dari 103 kecamatan terdapat 78 kecamatan yang bebas kasus (positif) PHMSZ dan 25 kecamatan yang terdapat kasus positif PHMSZ

c. Persentase pelayanan kesehatan hewan

Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan kesehatan hewan yaitu 50,23% atau 109,67% dari target 45,80%. Pada tahun 2025, pelayanan

pasif (Puskesmas/Kab/Kota) berjumlah 38.285 pelayanan, pelayanan vaksinasi berjumlah 62.845 pelayanan, pemeriksaan persyaratan sertifikat veteriner berjumlah 24.783 pemeriksaan, pelayanan aktif ke Kabupaten/Kota berjumlah 2.331 pelayanan dan pelayanan aktif klinik hewan berjumlah 2.031 pelayanan. Total pelayanan kesehatan hewan tahun 2025 berjumlah 130.275 pelayanan.

d. Tingkat kesembuhan GANGREP

Capaian kinerja indikator tingkat kesembuhan GANGREP adalah 92,75% atau 115,94% dari target 80,00%. Pada tahun 2025 didapatkan jumlah kasus GANGREP sebanyak 69 kasus dengan jumlah kesembuhan sebanyak 64 kasus.

2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

a. Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ

Capaian kinerja indikator Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ yaitu 1,21% atau 157,54% dari target 2,85%. Pada tahun 2025, didapatkan hasil uji RBT di 38 kecamatan diperoleh 1.624 sampel dengan hasil 20 sampel positif dan 1.604 sampel negatif.

b. Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan

Capaian kinerja indikator Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan yaitu 80,80% atau 101% dari target 80,00%. Pada tahun 2025, diperoleh data tingkat kepatuhan total dari triwulan I hingga IV yaitu frekuensi dengan total 11.816, pemenuhan dengan total 9.547, persentase 80,80%.

3) Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

a. Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting

Capaian kinerja indikator Jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting yaitu 33,33 gram/hari atau 109,28 gram/hari dari target 30,50 gram/hari. Program pemberian bantuan pangan asal hewan berupa

telur ayam ras dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Paser Tahun 2025 menasar 400 orang yang terdiri dari baduta potensi stunting serta ibu hamil dan ibu menyusui di beberapa kecamatan, dengan metode pemberian 1 butir telur per orang per hari (50 gram) selama 60 hari sehingga total distribusi mencapai 24.000 butir atau setara 144.000 gram protein. Capaian konsumsi telah memenuhi target kinerja sebesar 50 gram/orang/hari, namun apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal selama 3 bulan (180 hari) sebanyak 72.000 butir atau 432.000 gram protein, intervensi ini baru memenuhi sekitar 33,33% dari kebutuhan, sehingga masih diperlukan peningkatan durasi dan volume bantuan agar upaya pencegahan stunting dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan

Capaian kinerja indikator persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan yaitu 1,86% atau 137,78% dari target 1,35%. Target awal indikator Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pendampingan penerapan Kesejahteraan Hewan ditetapkan sebanyak 9 unit usaha peternakan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pembinaan dan pengawasan prinsip-prinsip kesrawan pada 31 unit usaha peternakan dengan total unit usaha yang telah menerapkan Kesrawan yaitu 16 unit usaha peternakan. Pembinaan dilakukan bersama dengan dinas kabupaten/kota.

c. Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)

Capaian indikator Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) yaitu 88,89% atau 103,36 dari target 86,00%. Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) pada Triwulan IV mencapai 88,89%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 86%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner berjalan efektif serta mampu meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan asal hewan, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai konsumen.

d. Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ

Capaian indikator Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ yaitu 36,00 unit atau 100% dari target 36,00 unit. Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel (darah segar, serum darah) ternak ruminansia besar dengan hasil negatif penyakit Brucellosis, Jembrana dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan untuk ruminansia kecil dengan hasil negatif penyakit Brucellosis, dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

e. Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif

Capaian indikator Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif yaitu 20,98% atau 112,58% dari target 24,00%. Realisasi persentase pemotongan ternak sapi betina produktif hingga Triwulan IV mencapai 20,98%, lebih baik (lebih rendah) dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 24%, dengan total kumulatif pemotongan ruminansia betina sebanyak 400 ekor dari 17.201 ekor pemotongan ruminansia secara keseluruhan dan tercatat tidak terdapat pemotongan betina produktif sepanjang tahun. Secara bertahap, persentase pemotongan menunjukkan tren penurunan dari Triwulan I hingga Triwulan IV, sehingga capaian akhir berada di bawah ambang target dan menunjukkan kinerja pengendalian pemotongan sapi betina produktif berjalan efektif serta mendukung upaya perlindungan populasi ternak betina produktif.

Beberapa faktor penghambat yang ada di program Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- Adanya kasus di kecamatan yang sama sehingga tidak menambah jumlah kecamatan yang terkendali zoonosis.
- Lalu lintas ternak antar wilayah kabupaten/kota serta antar peternak sulit terpantau yang berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit hewan, Kurangnya pemahaman peternak/kelompok ternak terkait pentingnya manajemen kesehatan hewan, Pelaporan kasus PHMSZ terkadang lambat sehingga petugas terlambat dalam penanganan kasus, Sistem pemeliharaan secara konvensional serta ekstensif.
- Keterbatasan SDM baik medik maupun paramedik di lapangan, Keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi sehingga menghambat pelaporan kasus

penyakit ke iSIKHNAS, Peternak belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan penyakit hewan secara cepat, terbatasnya ketersediaan Puskesmas di Kabupaten/Kota.

- Pelaporan kasus gangguan reproduksi/diagnose belum dilaporkan secara optimal, penanganan gangguan dan kesembuhan gangguan reproduksi belum dilaporkan secara menyeluruh pada iSIKHNAS; Keterbatasan SDM Medik Reproduksi di Kabupaten/Kota; Penanganan gangguan reproduksi memerlukan waktu yang relatif Panjang, gangguan reproduksi tidak menunjukkan gejala klinis yang nyata.
- Kurangnya pemahaman peternak/keompok ternak/koperasi terkait pentingnya manajemen kesehatan hewan, Pelaporan kasus PHMSZ terkadang lambat sehingga petugas terlambat dalam penanganan kasus, Keterbatasan sumber daya manusia medik dan paramedik veteriner, Penerapan biosecurity masih sangat kurang.
- Kasus stunting pada balita masih banyak terjadi dan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur
- Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan ASUH belum optimal karena masih ditemukan produk yang tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi
- Identifikasi status betina produktif belum optimal karena keterbatasan pemeriksaan reproduksi baik di RPH maupun di luar RPH
- Belum adanya indikator tetap tentang cara penilaian checklist kesrawan, sehingga kesimpulan unit usaha sudah dan belum optimal dalam menerapkan kesrawan berdasarkan kesepakatan tim, Belum adanya pemahaman peternak/keompok ternak/koperasi tentang kesejahteraan hewan, terutama pentingnya penerapan biosecurity dan recording terkait kesehatan ternak, Keterbatasan SDM dalam menangani ternaknya (Paling banyak 4 penjaga untuk 1 unit usaha) sehingga kurang monitoring
- Ketidaksesuaian informasi yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya, ketidakmampuan sistem pelacakan dan sertifikasi produk, kendala geografis dan infrastruktur, tantangan dalam penegakan peraturan dan pengawasan, isu keamanan pangan dan kesehatan hewan, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk implementasi sistem yang efektif.

Beberapa faktor pendorong yang ada di program Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dini zoonosis
- Tersedianya prasarana pendukung yaitu Pusat Kesehatan Hewan, sarana pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan penyakit hewan, Komitmen dari petugas
- Terdapat unit pelayanan kesehatan hewan yaitu Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) dan Klinik Hewan, Tim Pelayanan Keswan terkait dengan kontrol populasi HPR, Peraturan perundangan, Sarana pendukung pelayanan keswan
- Adanya Tim Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Adanya Medik Reproduksi, Sarana penunjang penanganan gangguan reproduksi
- Kelompok ternak pada lokasi Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sudah berbadan hukum, Kelompok ternak sebagian besar sudah terdaftar di Simluhtan, Adanya Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Tersedianya sarana pelayanan keswan dan biosekuriti (obat, alat keswan dan desinfektan)
- Pemberian bantuan pangan asal hewan berupa telur dimana dengan mengkonsumsi telur dapat membantu meningkatkan asupan protein dan mikronutrien penting yang mendukung pertumbuhan optimal.
- Kewajiban NKV sesuai UU 18/2009 jo. UU 41/2014 dan Perlindungan konsumen produk hewan
- Adanya Perda dan Pergub terkait pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepolisian RI terkait pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif
- Upaya untuk menjamin keamanan dan kesehatan produk hewan dari penyakit, memastikan produk sesuai standar, mengontrol pergerakan antar wilayah, serta mendukung antar wilayah, serta mendukung perdagangan yang aman dan sehat melalui pemeriksaan oleh otoritas dan penerbitan sertifikat yang sesuai

Tindak lanjut:

- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pengamatan dini melalui surveilans/pengambilan dan pemeriksaan laboratories, pencegahan PHMSZ melalui vaksinasi hewan, pengendalian dan penanggulangan PHMSZ
- Peningkatan kapasitas petugas di lapangan, membuat jejaring sehingga mempercepat respon penanganan penyakit melalui pelayanan kesehatan hewan, komunikasi informasi dan edukasi kepada peternak

- Melakukan koordinasi dengan Koordinator iSIKHNAS khususnya di Kabupaten/Kota terkait pelaporan Gangrep melalui iSIKHNAS, Membuat timeline berupa pencatatan kasus gangrep, penanganan sampai tingkat kesembuhan gangrep, Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait kasus dan penanganan gangrep di lapangan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat

Indikator sasaran strategis 3 (tiga) adalah :

1. **Nilai Akuntabilitas Kinerja**
2. **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Akuntabilitas kinerja mencerminkan sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka secara transparan, efektif, dan efisien, serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kepuasan masyarakat mengukur sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga. Kepuasan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecepatan pelayanan, kualitas layanan, keterbukaan informasi, serta responsivitas terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Meningkatkan kedua aspek ini, perangkat daerah perlu menerapkan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang berbasis hasil, memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi, serta mengembangkan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 39. Capaian Sasaran Strategis 2 (Dua)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100)$
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78,54	80,65	102,69
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,50	88,68	103,72
Capaian Kinerja Sasaran 3						103,20

Pengukuran kinerja terhadap sasaran ini sangat baik, karena capaian rata-rata Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat mencapai 103,20% dengan capaian nilai akuntabilitas sebesar 102,69% dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 103,72%.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2024
			2024	2025	
1	2	3	4	5	$6 = ((5-4)/4) * 100$
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	81,70	80,65	-1,05
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,03	88,68	2,65

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja mengalami penurunan poin sebesar 1,29 dan Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan poin sebesar 3,08. Penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja atau SAKIP tahun 2024 dan tahun 2025 memiliki poin penilaian yang berbeda.

Tabel 41. Realisasi Sasaran 3 (tiga) terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 5/4 * 100$
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80,01	80,65	100,80
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,00	88,68	103,12

Dari tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2025 mencapai nilai 80,65 sedangkan target akhir Renstra nilai sebesar 80,01, sehingga realisasi sudah dianggap mencapai target akhir Renstra dan diharapkan akan terus memperbaiki akuntabilitas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 mencapai nilai 88,68 dari target akhir renstra dan diharapkan agar terus meningkat pada tahun selanjutnya.

Tabel 42. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran 3 (tiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	%Rata-rata Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	103,20	89,31	13,89

Pada sasaran ketiga Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat memiliki tingkat efisiensi 13,89%, sehingga dengan anggaran 89,31% dapat mencapai rata-rata capaian kinerja lebih dari 100%.

Tercapainya sasaran 3 (tiga) ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	95,17	98,21	103,19	40.997.606.258,00	35.587.884.230,00	86,8
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	%	100,00	100,00	100			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	92,00	100,00	108,7	996.540.397,00	921.488.515,00	92,47
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	8,00	100	242.042.748,00	207.136.847,00	85,58
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	13.972.520,00	13.910.000,00	99,55
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	8.264.984,00	8.058.350,00	97,5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	4,00	80	74.512.963,00	73.059.000,00	98,05

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9,00	8,00	88,89	657.747.182,00	619.324.318,00	94,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	Skor	91,00	88,67	97,44	29.327.839.271,00	25.102.122.202,00	85,59
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	182,00	170,00	93,41	28.485.827.071,00	24.309.512.102,00	85,34
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	12,00	100	718.850.000,00	679.900.000,00	94,58
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00	100	5.710.000,00	3.910.000,00	68,48
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	100	9.800.000,00	7.928.000,00	80,9
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	98.993.060,00	93.365.300,00	94,31
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	2,00	100	8.659.140,00	7.506.800,00	86,69

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	Skor	83,00	100,00	120,48	99.607.400,00	79.878.770,00	80,19
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	10.460.000,00	8.446.985,00	80,76
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	2,00	100	63.088.900,00	46.628.300,00	73,91
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,00	4,00	100	26.058.500,00	24.803.485,00	95,18
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	Skor	83,00	100,00	120,48	460.988.900,00	437.786.406,00	94,97
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	170.767.656,00	159.240.900,00	93,25
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100	10.964.000,00	9.613.500,00	87,68
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4,00	4,00	100	81.107.480,00	79.923.000,00	98,54

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	18,00	49,00	272,22	198.149.764,00	189.009.006,00	95,39
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	%	83,00	97,90	117,95	778.417.823,00	727.785.622,00	93,5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100	31.134.806,00	31.086.950,00	99,85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	29,00	29,00	100	222.755.045,00	211.102.309,00	94,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	8,00	100	85.075.972,00	77.437.540,00	91,02
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17,00	17,00	100	33.252.000,00	23.716.200,00	71,32
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	100	406.200.000,00	384.442.623,00	94,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	%	83,00	83,00	100	1.909.814.426,00	1.890.358.210,00	98,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	83,00	83,00	100	1.909.814.426,00	1.890.358.210,00	98,98
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83,00	83,53	100,64	5.245.339.806,00	4.348.913.461,00	82,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	4,00	100	16.668.000,00	12.472.000,00	74,83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100	510.515.406,00	478.740.385,00	93,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	100	4.718.156.400,00	3.857.701.076,00	81,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	83,00	72,39	87,22	2.179.058.235,00	2.079.551.044,00	95,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18,00	18,00	100	319.453.400,00	298.804.793,00	93,54
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168,00	168,00	100	125.061.150,00	117.643.100,00	94,07
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8,00	9,00	112,5	23.024.400,00	19.400.376,00	84,26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8,00	7,00	87,5	1.711.519.285,00	1.643.702.775,00	96,04

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 2 (dua) outcome, Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti. Realisasi Capaian Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan mencapai 103,19% dan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti pada Dinas dan UPTD mencapai 100% yang berarti layanan kesekretariatan berjalan sesuai dengan prosedur dan keluhan pengguna layanan telah seluruhnya ditindaklanjuti, program ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Indikator Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu dengan capaian 100% dari target 92% atau capaian 108,7%. Terdapat 18 dokumen yang disusun tepat waktu dari 20 dokumen. Dokumen yang telah disusun tepat waktu adalah RENSTRA 2025-2029, RENJA 2025, Perjanjian Kinerja, IKU, DPA, RKA, Rencana Aksi, Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja dan Casecading, LHE dan TLHE AKIP, Laporan monitoring dan evaluasi (Renja, Renaksi, PK), SOP, IKI, dan Pengukuran Kinerja.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Indikator Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran Skor 88,66 dari target 91 skor, dengan capaian realisasi keuangan seluruh Dinas dan UPTD menurut konsolidasi Bersama BPKAD per 31 Desember 2025 adalah 89,30%.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Realisasi capaian Indikator Tingkat Pengelolaan administrasi BMD dengan skor 100 dari target skor 83. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pengamanan aset, serta penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada tingkat SKPD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Realisasi Tingkat Pengelolaan kepegawaian 100 Skor dari target 83 Skor. adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan pakaian dinas, penyusunan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi

kepegawaian, monitoring evaluasi dan penilaian kinerja, serta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum 97,90% dari target 83% atau capaian 117,95%, sehingga administrasi umum berjalan dengan baik selama tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Realisasi Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah 83% dari target 83%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 83 unit.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83,53% dari target 83%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi capaian Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik 72,39% dari target 83%, Nilai sarana dan prasarana yang berfungsi baik adalah sebesar Rp29.611.178.564, atau sekitar 72,3% dari total nilai aset dalam Daftar Inventaris Barang (BMD) yang mencapai Rp40.903.651.161. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 18 unit

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 168 unit
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud sebanyak 9 unit
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 7 unit

Beberapa faktor penghambat dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- Pembayaran Gaji PPPK yang dialokasikan 14 bulan, regulasi pengangkatan dibagi 2 tahap sehingga tidak dapat terealisasi dari yang di anggarkan
- Terdapat KPA yang memasuki Purna Tugas sehingga Honorarium di bulan November dan Desember tidak dapat di bayarkan
- SPJ masih ber ulang kesalahan
- Pengelolaan informasi data keuangan dan entri realisasi prognosis belum berjalan optimal sehingga menimbulkan ketidaktepatan waktu dan akurasi dalam penyajian laporan
- Belum optimalnya pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD baik secara fisik dan administratif.
- Perubahan kondisi barang (rusak berat, hilang, mutasi antar unit) belum segera dilaporkan dan diperbarui sehingga Inventarisasi barang secara periodik belum terlaksana sesuai ketentuan
- Ketika terjadi pemadaman listrik, sistem membutuhkan waktu lama untuk beralih ke genset
- Pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing serta mekanisme pembayaran melalui INAPROC berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan hingga dana diterima oleh penyedia
- Perencanaan angkas yang tidak sesuai mengakibatkan hambatan saat diperlukan dana untuk kegiatan pencetakan maupun penggandaan
- Distribusi dan akses terhadap bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan belum optimal, baik dalam bentuk cetak maupun digital

- Pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing serta mekanisme pembayaran melalui INAPROC berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan hingga dana diterima oleh penyedia
- rendahnya realisasi pada belanja paket pengiriman dikarenakan perubahan sistem surat menyurat ke surat digital (melalui SRIKANDI)
- DPA belum terbit sehingga pembayaran Air, Listrik, Telepon dan internet pada bulan Januari terhambat.
- Kelebihan anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi (3 bulan pembayaran) dikarenakan pengangkatan PPPK Tahap 2
- Dana pada SSH untuk pembayaran STNK kendaraan tidak sesuai
- Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu dan diperlukan pemberian teguran agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan

Adapun faktor pendorong dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya terbitnya SP2D & SPM Gaji dan TPP PNS dan P3K
- Terlaksananya administrasi pelaksana tugas ASN
- Terlaksananya verifikasi surat perintah pembayaran (SPP)
- Tersediannya pelaporan dan analisis prognosis keuangan
- Adanya komitmen pimpinan untuk tertib administrasi aset dan pengamanan BMD
- Ketersediaan aplikasi penatausahaan aset mempermudah pencatatan, pelaporan aset secara berkala
- Sinergitas dan koordinasi yang berjalan baik dengan pihak-pihak terkait
- Mengadakan uji coba pemutusan listrik (simulasi) secara berkala untuk memastikan sistem cadangan berfungsi
- Dukungan SDM yang kompeten
- Pemanfaatan digitalisasi dokumen
- Adanya transisi ke sistem persuratan digital (Srikandi) yang dapat mengurangi kebutuhan surat fisik dan anggaran.
- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten

- Adanya transisi ke sistem persuratan digital (Srikandi) yang dapat mengurangi kebutuhan surat fisik dan anggaran.
- Koordinasi yang efektif antara PPTK dan bendahara pengeluaran
- sinkronisasi data pegawai dengan kebutuhan anggaran
- Ketersediaan data biaya STNK yang akurat dan terbaru
- Dukungan regulasi dan kebijakan internal mengenai penegakan disiplin pelaksanaan kegiatan

Adapun upaya dalam menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Diklat
- Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- Memaksimalkan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) Pembantu.

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Keuangan

Pagu anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 133.430.018.800,00,-. Melalui Surat Edaran Gubernur No 900.1/4138/III/BPKAD/2025 tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tanggal 8 November 2025 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp131.347.111.882,00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp116.294.326.594,00,- dan Belanja Modal Rp15.052.785.288,00,-.

Adapun realisasi anggaran Rp 117.299.586.595,00,- (89,30%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja operasi Rp 103.559.255.782,00,- atau sebesar 89,04%
- b. belanja modal sebesar Rp13.740.330.813,00,- atau sebesar 91,28%.

Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran APBD per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 117.299.586.595,00,- atau 89,30% dari total anggaran sebesar Rp131.347.111.882,00,- yang terdiri dari dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim realisasi Rp99.188.824.396,- atau 88,66% dari pagu Rp111.870.935.853,- UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dengan realisasi Rp5.668.209.357,00,- atau 96,56% dari pagu Rp5.870.136.265,00,- dan UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Penajam Paser Utara dengan realisasi Rp12.442.552.842,00,- atau 91,45% dari pagu Rp13.606.039.764,00,-.

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 44. Realisasi Sasaran Strategis RENSTRA 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	109,12	107,17	98,21	12.696.574.509,00	11.957.441.584,00	94,18
2	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak	Produksi Daging	77.773,30	83.460,57	107,31	62.992.353.273,00	56.246.627.802,00	89,29
		Produksi Telur	15.799,20	13.671,83	86,53			
		Produksi Aneka Ternak Lainnya	183,70	189,03	102,90			

Penyerapan anggaran

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 3 (tiga) sasaran kinerja, yang termasuk dalam sasaran strategis adalah sasaran 1 (satu) “Meningkatkan Kesejahteraan Peternak” dan sasaran 2 (dua) “Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak”. Penyerapan anggaran sasaran strategis per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp68.204.069.386,00,- atau 90,11% dari anggaran sebesar Rp 75.688.927.782,00,-. Anggaran yang termasuk sasaran strategis sebesar 57,62% dari pagu total anggaran.

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran		Realisasi		% Capaian	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	12.696.574.509,00	7.135.712.417,00	11.957.441.584,00	6.213.181.011,00	94,18	87,07
2	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak	62.992.353.273,00	40.490.706.295,00	56.246.627.802,00	38.837.095.799,00	89,29	95,92

Penyerapan anggaran Tahun 2025 dari sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Peternak mencapai 94,18% dari total anggaran Rp12.696.574.509,00,- capaian anggaran mengalami penurunan (7,11)% dari Tahun 2024 mencapai 87,07% dari total anggaran Rp7.135.712.417,00,-. Anggaran Tahun 2025 dari sasaran strategis Meningkatkan Produksi Pangan Asal Ternak mencapai 89,29% dari total

anggaran Rp62.992.353.273,00 capaian anggaran mengalami penurunan (6,63)% dari Tahun 2024 mencapai 95,92% dari total anggaran Rp. 40.490.706.295,00.

Tabel 46. Realisasi anggaran sasaran 3 (tiga) RENSTRA 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,54	81,7	104,02	55.658.184.100,00	49.095.517.209,00	89,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	88,68	103,72			

Penyerapan anggaran asaran 3 (tiga) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kepuasan Masyarakat mencapai 89,31% dari total Rp55.658.184.100,00 yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

Tabel 47. Realisasi Anggaran Dinas dan UPTD lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	131.347.111.882,00	93,40	117.299.586.595,00	89,30
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	111.870.935.853,00	90,25	99.188.824.396,00	88,66
UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	13.606.039.764,00	98,89	12.442.552.842,00	91,45
UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	5.870.136.265,00	99,11	5.668.209.357,00	96,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.942.663.779,00	100	3.799.612.080,00	96,37

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.717.914.063,00	90,25	9.584.901.177,00	89,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.997.606.258,00	100	35.711.003.952,00	87,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	996.540.397,00	100	935.752.563,00	93,90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	242.042.748,00	100	221.846.875,00	91,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.972.520,00	100	13.910.000,00	99,55%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.264.984,00	100	8.058.350,00	97,50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.512.963,00	100	73.059.000,00	98,05%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	657.747.182,00	100	618.878.338,00	94,09%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.791.000,00	100	123.699.000,00	99,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.350.380,00	100	146.324.000,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.327.839.271,00	98,75	25.111.022.202,00	85,62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.485.827.071,00	93,20	24.308.577.720,00	85,34
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.791.000,00	100	123.699.000,00	99,12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.350.380,00	100	146.324.000,00	99,98
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	718.850.000,00	62,54	674.740.000,00	94,83

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.871.000,00	100	4.779.000,00	81,40
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.150.380,00	100	1.124.000,00	97,71
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.710.000,00	100	5.614.000,00	98,32
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.800.000,00	90,89	7.928.000,00	80,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	98.993.060,00	100	98.811.300,00	99,82
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.659.140,00	98,60	7.506.800,00	86,69
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.554.300,00	80,10	14.557.150,00	61,80
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.159.625,00	100	49.949.000,00	99,58
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	99.607.400,00	96,93	83.023.770,00	83,35
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.301.140,00	80,25	3.570.500,00	67,35
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.150.380,00	100	989.000,00	85,67
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.460.000,00	100	10.336.985,00	98,82
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.531.140,00	80,10	10.245.350,00	65,97

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.248.865,00	100	43.202.000,00	99,89
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	63.088.900,00	90,78	46.628.300,00	73,91
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.722.020,00	51,00	741.300,00	27,23
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.248.865,00	100	43.202.000,00	99,96
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.058.500,00	100	26.058.485,00	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.737.000,00	100	109.212.550,00	99,52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.672.300,00	100	53.496.200,00	84,02
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	460.988.900,00	100	439.452.406,00	95,33
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.737.000,00	100	37.412.550,00	99,14
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170.767.656,00	100	159.240.900,00	93,25
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.964.000,00	100	10.719.500,00	97,77
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	81.107.480,00	100	80.783.000,00	99,60
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	100	71.800.000,00	99,72
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.672.300,00	100	53.496.200,00	84,02
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	198.149.764,00	100	188.709.006,00	95,24

Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.130.881,00	100	246.822.663,00	99,88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.904.358,00	100	275.992.232,00	99,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.417.823,00	100	762.042.622,00	97,90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.344.647,00	100	10.340.895,00	99,96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.338.395,00	100	20.336.500,00	99,99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.134.806,00	100	31.086.950,00	99,85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.754.568,00	100	36.501.448,00	99,31
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.031.841,00	100	78.205.850,00	97,72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	222.755.045,00	100	211.102.309,00	94,77
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.171.666,00	100	33.134.000,00	99,89
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.399.122,00	100	12.366.152,00	99,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.075.972,00	100	84.472.540,00	99,29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000,00	100	3.950.000,00	99,75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.252.000,00	100	33.242.200,00	99,97

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.900.000,00	100	162.896.320,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.135.000,00	100	165.083.730,00	99,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.200.000,00	100	402.138.623,00	99,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.417.555.701,00	100	2.380.206.260,00	98,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.063.392.779,00	100	1.023.612.237,00	96,26
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.909.814.426,00	100	1.890.358.210,00	98,98
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.417.555.701,00	100	2.380.206.260,00	98,46
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.063.392.779,00	100	1.023.612.237,00	96,26
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.909.814.426,00	100	1.890.358.210,00	98,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.867.700,00	90,86	629.407.615,00	89,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.989.200,00	100	949.570.620,00	99,02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.245.339.806,00	91,23	4.381.622.217,00	83,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.356.000,00	77,99	13.536.460,00	77,99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00	100	14.047.500,00	95,04
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.668.000,00	100	15.172.000,00	91,02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.454.000,00	76,07	149.449.155,00	76,07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.132.800,00	100	147.975.120,00	96,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.515.406,00	100	500.727.621,00	98,08
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.057.700,00	97,24	466.422.000,00	94,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	790.076.400,00	100	787.548.000,00	99,68
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.718.156.400,00	90,25	3.865.722.596,00	81,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.027.197,00	100	295.706.842,00	93,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.157.445.421,00	100	7.085.956.888,00	86,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.179.058.235,00	100	2.108.664.344,00	96,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.120.000,00	100	96.961.287,00	95,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.165.500,00	100	213.990.688,00	98,99

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.453.400,00	100	319.208.093,00	99,92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.631.497,00	100	146.119.055,00	90,97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.010.700,00	100	190.714.400,00	99,84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.061.150,00	100	124.833.100,00	99,82
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.295.700,00	100	29.751.500,00	98,20
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	23.024.400,00	100	20.920.376,00	90,86
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.980.000,00	100	22.875.000,00	99,54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.750.269.221,00	100	6.681.251.800,00	86,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.711.519.285,00	100	1.643.702.775,00	96,04
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.888.125.701,00	100	2.857.651.665,00	98,94
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.737.435.565,00	97,74	40.895.463.832,00	93,50
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.984.103.068,00	86,31	1.676.841.269,00	84,51
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.160.221.766,00	85,20	972.452.757,00	83,82
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	823.881.302,00	87,87	704.388.512,00	85,50

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	2.888.125.701,00	100	2.857.651.665,00	98,94
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1.430.362.792,00	100	1.414.374.818,00	98,88
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.457.762.909,00	100	1.443.276.847,00	99,01
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.039.249.699,00	87,61	2.610.904.949,00	85,91
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.727.349.143,00	84,21	1.417.933.057,00	82,09
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.311.900.556,00	92,10	1.192.971.892,00	90,93
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.027.525.865,00	91,57	3.653.854.255,00	90,72
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.457.470.590,00	92,32	2.265.639.250,00	92,19
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan	1.570.055.275,00	90,39	1.388.215.005,00	88,42

HPT, Bahan Pakan, Pakan				
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	314.820.636,00	100	311.840.630,00	99,05
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	314.820.636,00	100	311.840.630,00	99,05
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	34.371.736.297,00	100	32.642.022.729,00	94,97
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	34.371.736.297,00	100	32.642.022.729,00	94,97
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.506.836.592,00	77,07	10.391.095.479,00	71,63
Penataan Prasarana Pertanian	14.506.836.592,00	77,07	10.391.095.479,00	71,63
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	14.506.836.592,00	77,07	10.391.095.479,00	71,63
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.927.472.486,00	99,19	1.868.597.277,00	96,95
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	10.185.095.964,00	99,10	9.834.836.476,00	96,56
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.838.117.614,00	99,59	5.615.818.431,00	96,19

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	2.100.803.127,00	99,41	2.055.035.441,00	97,82
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	418.870.136,00	99,94	411.820.715,00	98,32
Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	3.054.861.419,00	100	2.904.312.817,00	95,07
Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	263.582.932,00	95,69	244.649.458,00	92,82
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.916.585.997,00	100	1.910.660.818,00	99,69
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	1.750.206.423,00	100	1.744.670.340,00	99,68
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	166.379.574,00	100	165.990.478,00	99,77
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.927.472.486,00	99,19	1.868.597.277,00	96,95
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	2.234.574.591,00	97,61	2.123.166.242,00	95,01
Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	537.633.358,00	99,22	512.716.482,00	95,37

Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	182.457.416,00	96,13	149.516.600,00	81,95
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.927.472.486,00	99,19	1.868.597.277,00	96,95
Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	163.505.512,00	92,13	151.019.895,00	92,36
Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	805.691.488,00	99,63	797.021.913,00	98,92
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	329.437.124,00	93,88	300.504.170,00	91,22
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	215.849.693,00	97,13	212.387.182,00	98,40
Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	195.817.762,00	92,76	185.190.985,00	94,57
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	195.817.762,00	92,76	185.190.985,00	94,57
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	142.214.340,00	99,05	141.788.500,00	99,70
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.214.340,00	99,05	141.788.500,00	99,70
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	71.920.520,00	100	71.589.700,00	99,54

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	70.293.820,00	98,08	70.198.800,00	99,86
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.301.747.134,00	97,85	2.214.636.157,00	96,22
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	376.023.682,00	95,32	353.252.991,00	93,94
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	218.544.874,00	91,95	197.272.415,00	90,27
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	157.478.808,00	100	155.980.576,00	99,05
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.925.723.452,00	98,35	1.861.383.166,00	96,66
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	1.552.432.312,00	99,36	1.505.807.060,00	97,00
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	373.291.140,00	94,11	355.576.106,00	95,25

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan peternakan tahun 2025 tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mempunyai alokasi anggaran baik bersumber dari APBD (belanja operasi dan belanja modal) dan APBN. Pencapaian sasaran strategis didukung oleh capaian realisasi pada program, kegiatan hingga sub kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program/kegiatan/sub kegiatan ini secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun permasalahan yang ada pada pencapaian realisasi keuangan dan fisik sasaran sebagai berikut:

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; menginstruksikan untuk dilakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 Tentang Tindak lanjut arahan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran transfer ke daerah tahun 2025; point E. (8) Melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan ditetapkan
- KEPMENDAGRI No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 UPDATE NOMENKLATUR adanya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terkait dengan belanja pembuatan kandang urusan kabupaten/kota yaitu pembangunan prasarana pertanian sedangkan urusan provinsi yaitu penataan prasarana pertanian.
- Daerah sumber bibit ternak masih adanya indikasi penyakit hewan menular strategis zoonosis (PHMSZ) khususnya pada penyakit mulut dan kuku (PMK)
- Alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan (perhitungan 100%) didasarkan pada data Aplikasi Sienggang. Hal ini telah mempertimbangkan faktor pengurangan pegawai (pensiun dan meninggal dunia), penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Tahap 1 yang terlambat pada Mei dan PPPK Tahap 2 pada Oktober, serta pencadangan kenaikan gaji ASN sebesar 2,5%
- SiLPA berasal dari efisiensi belanja pada pengadaan tender fisik, Penunjukan Langsung (PL), dan E-purchasing, di mana realisasi harga pengadaan lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang direncanakan

- Honorarium tenaga pendamping PDKT mengalami penyesuaian dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) orang pendamping lokasi PDKT 2024 dialokasikan melalui APBD Kabupaten, sedangkan untuk PDKT 2025, pendampingan baru akan dimulai pada bulan Mei setelah terbentuknya koperasi.

BAB. IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur termasuk predikat kinerja sangat tinggi (capaian $91 \leq 100$) karena capaian keseluruhan indikator mencapai 100,11%. Dari 6 (enam) indikator, seluruh capaian kinerja dengan predikat kinerja sangat tinggi yaitu indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan, Produksi Daging, Produksi Telur, Produksi Aneka Ternak Lainnya, Nilai Akuntabilitas Kinerja Dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders,

sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2025, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain :

- 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD maupun APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

- 2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.